

Peran perempuan sebagai penopang ketahanan pangan keluarga maupun masyarakat adalah fakta sosial yang bisa ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Aceh. Perempuan berkiprah bukan hanya sebagai pengolah bahan pangan yang dibawa pulang laki-laki ke rumah. Lebih dari itu, mereka berperan langsung sebagai penyedia pangan.

Di Tanah Gayo, Provinsi Aceh, para perempuan menjadi petani bersama laki-laki di rumah mereka, baik itu ayah ataupun suaminya. Perempuan Gayo ikut berjuang agar keluarganya terjaga dari masalah kerawanan atau krisis pangan. Mereka bekerja di ladang, menanam kopi, mendirikan koperasi yang dapat menyejahterakan, hingga menuntut ilmu pertanian di perguruan tinggi guna meningkatkan kecakapannya.

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang profil perempuan Gayo yang menjadi pahlawan dalam menjaga bahkan memperkuat ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Perjuangan mereka yang menginspirasi sepatasnya disiarkan kepada khalayak untuk



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3
www.sejabumipersada.com
Telp. 085260363550



GENDER DAN KESEHATAN PANGAN

Gender & Pangan

Potret Perempuan Gayo sebagai Pilar Ketahanan Pangan Keluarga

Pengantar:

Prof. Dr. Herman Fithra, Asean Eng.
Rektor Universitas Malikussaleh



Jullimursyida, Ph.D
Dr. Rozanna Dewi
Dr. Mawardati
Dr. Khalsiah
Dr. Yulia
Deassy Siska, M.Si

SAMBUTAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	v
BAGIAN 1: TANAH GAYO YANG MAKMUR	1
1.1. Pembangunan Pertanian	4
1.2. Kerawanan versus Ketahanan Pangan	8
1.3. Kontribusi Perempuan dalam Ketahanan Pangan.....	10
1.4. Konteks Gender dalam Ketahanan Pangan	11
BAGIAN 2: PEREMPUAN SEBAGAI PILAR KETAHANAN PANGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT.....	16
2.1. Pembagian Peran/Kerja Berbasis Gender.....	22
BAGIAN 3: PERAN KOPERASI DALAM PENYEJAHTERAAN PETANI PEREMPUAN	29
3.1. Isu Kepemimpinan dalam Koperasi	30
3.2. Koperasi Khusus Perempuan sebagai Keniscayaan.....	37
3.3. Perempuan, Kopi, dan Koperasi	41
3.4. Kokowagayo: Dari Dataran Tinggi ke Pentas Internasional.....	45
BAGIAN 4: Perempuan dan Pengetahuan: Kontribusi Lulusan Universitas Malikussaleh dalam Pertanian di Gayo.....	47
4.1. Tantangan-Tantangan Sarjana Pertanian	50
4.2. Pengaruh Kurikulum terhadap Kecakapan Petani Perempuan.....	52
PENUTUP	58
BIBLIOGRAFI	60

Sambutan Rektor:

Keberpihakan kepada Perempuan untuk Penguatan Ketahanan Pangan

ISU gender kian menjadi perhatian banyak kalangan dewasa ini dengan berbagai argumentasi dan kontroversinya yang mengirinya, terutama ketika dianalisa melalui pendekatan agama. Ada penolakan di beberapa daerah dan beberapa negara karena istilah gender sering dimaknai secara keliru, seperti kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dengan melupakan kodrat hakiki seorang perempuan. Bahkan ada yang kemudian menyimpulkan bahwa gender itu adalah sebuah situasi di mana seorang istri boleh melawan suami. Banyak pandangan serupa terdengar dalam dikusi dan perdebatan tentang gender yang seringkali dinilai berasal dari Barat.

Perdebatan ini sulit mendapatkan titik temu ketika sejak awal sudah memahami gender secara keliru dan tidak memiliki cukup referensi yang kuat serta relevan, apalagi jika kemudian ada kepentingan politik yang menyertainya. Padahal kalau menengok sejarah masa lalu, praktik-praktik tentang kesetaraan gender sudah terbangun dengan kuat, termasuk dalam sejarah perjuangan di Aceh. Kepemimpinan seorang perempuan di Aceh antara lain bisa dilihat dari perjuangan Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia. Kalau mau melihat lebih ke belakang, ada Sultanah Nahrasiyah yang memimpin Kerajaan Islam Samudra Pasai. Bukan hanya dalam hal kekuasaan kita bisa merujuk peran perempuan yang signifikan di masa lalu, dalam bidang ekonomi pun, kita bisa menemukan banyak referensi kuat yang membuktikan perempuan sudah memiliki peran strategis di masa lalu.

Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Aceh, peran penting perempuan sudah ada sejak lama sampai sekarang. Pemandangan itu bisa dengan mudah disaksikan di berbagai bidang, termasuk perkebunan seperti yang digambarkan dalam buku ini. Perempuan Gayo—terutama yang bermukim di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah—bahu-membahu bersama lelaki menggarap lahan kopi yang merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat Gayo. Tanpa mengingkari kodratnya sebagai perempuan, perempuan Gayo dengan anggun bekerja di antara deretan pohon kopi setelah menyelesaikan pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus anak dan berbagai kebutuhan suami.

Bisa dibayangkan betapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan perempuan. Pekerjaan di ladang kopi seperti yang ditunjukkan perempuan Gayo yang berpengaruh terhadap penguatan ketahanan pangan keluarga, membuktikan bahwa mereka bukan kelompok rentan. Perempuan Gayo adalah kelompok penentu dalam membangun ketahanan pangan keluarga yang berimplikasi positif terhadap ketahanan pangan masyarakat dan negara. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dari lelaki, setiap kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan adalah upaya yang berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan nasional.

Profil perempuan Gayo yang diangkat dalam buku ini barangkali belum bisa mewakili karakteristik perempuan Gayo secara keseluruhan, terutama mereka yang bermukim di luar Bener Meriah dan Aceh Tengah yang menjadi lokus dari penelitian buku ini. Namun, beberapa narasumber adalah pelaku utama yang “keperkasaannya” dalam menjaga ketahanan pangan sudah teruji selama bertahun-tahun. Perempuan Gayo memiliki formula dalam

membangun sistem ketahanan pangan keluarga, bahkan di masa sulit akibat pandemi Covid-19. Dan ini adalah kekuatan perempuan yang belum banyak diangkat ke permukaan.

Buku ini lahir dari sebuah penelitian yang melibatkan banyak pihak, terutama para perempuan di *Tanoh Gayo* dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selama ini, sudah banyak penelitian di Universitas Malikussaleh yang didanai dari berbagai sumber dan kemudian diterbitkan menjadi buku sehingga bisa menjangkau pembaca lebih banyak. Namun, buku ini secara spesifik mengangkat sisi gender dari aspek ekonomi (baca:ketahanan pangan) serta sisi kebudayaan, sebuah topik yang terus relevan sampai kapanpun.

Saya mengapresiasi kerja kolaboratif para peneliti sekaligus penulis buku ini. Harapannya, buku ini bisa menjadi referensi penelitian sejenis, baik di Aceh maupun di daerah lain di Indonesia, bahkan dunia, sebab masalah gender merupakan isu global. Beberapa rekomendasi dalam buku ini juga diharapkan bisa memengaruhi kebijakan publik yang lebih memihak kepada perempuan.

Meski tidak dikupas lebih dalam karena itu menjadi tema yang berbeda, buku ini juga mengingatkan kita tentang penyusunan kurikulum yang lebih membumi, terutama di Fakultas Pertanian, agar pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman sehingga ilmu yang diperoleh di bangku kuliah bisa dimanfaatkan di dunia kerja.[]

Lhokseumawe, Desember 2021

Prof. Dr. Herman Fithra, Asean Eng.
Rektor Universitas Malikussaleh

KATA PENGANTAR

KAJIAN mengenai kedudukan petani perempuan sebagai pilar ketahanan pangan telah dilakukan oleh banyak peneliti dari banyak institusi. Karya-karya mereka berhasil menunjukkan secara sistematis bagaimana para petani perempuan di seluruh dunia—termasuk Indonesia—memegang kendali atas kontrol pangan keluarga maupun komunitas.

Hasil penelitian yang dibuat para peneliti itu segera memukul asumsi yang melihat perempuan semata sebagai “pengolah” pangan yang dibawa pulang oleh suaminya (laki-laki) ke rumah; perempuan dinilai cuma memasak bahan makanan yang dihasilkan oleh laki-laki sehingga peran mereka tidak menjadi determinan dalam ketahanan pangan keluarga.

Buku ini juga hendak menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sebagai “pengolah pangan” sekaligus “penjamin ketersediaan pangan”, dua peran yang tidak bisa diambilalih para lelaki. Akan tetapi, kami, para penulis, tak hendak merepetisi pembahasan tersebut.

Kami melakukan penelitian yang serius di kawasan Dataran Tinggi Gayo, mewawancarai banyak perempuan petani, lalu antara lain menemukan fakta bahwa para perempuan petani di beberapa kabupaten dan kota di Tanah Gayo juga memang melakukan hal sama seperti “teman-teman” mereka di seluruh dunia. Akan tetapi di samping sifat-sifat umum yang dibawa bersama oleh semua kelompok, tetap ada keunikan-keunikan di dalam masing-masing masyarakat. Hal-hal yang unik di kalangan perempuan petani Gayo tidak terdapat pada komunitas petani perempuan di tempat lain. Demikian sebaliknya. Keunikan-keunikan itulah yang memperkaya pengetahuan mengenai keterlibatan perempuan di dalam pertanian, khususnya dalam isu ketahanan pangan.

Dataran Tinggi Gayo adalah wilayah ekonomi sekaligus kebudayaan. Uniknya, dua hal itu dibangun oleh satu komoditas: kopi. Kopi adalah barang dagangan di seluruh dunia. Kopi juga bagian dari kebudayaan orang Gayo (sebutan untuk mereka yang bersuku Gayo). Laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di dalamnya. Namun para perempuan Gayo yang ikut bertani adalah fenomena yang penting dikaji karena terdapat banyak pengetahuan unik sekaligus menginspirasi banyak perempuan di daerah lain.

Dalam banyak hal, perempuan petani Gayo merupakan entitas yang cemerlang dalam urusan ketahanan pangan keluarga dan komunitasnya. Mereka berhasil membuat formula perlindungan berlapis-lapis untuk menghadapi krisis pangan. Mereka membuat strategi-strategi yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya punya dampak baik dan berjangka panjang. Pohon-pohon tomat di pekarangan rumah bukanlah pemandangan yang bisa membuat perasaan tertarik. Itu biasa saja. Tetapi ketika harga-harga makanan di pasaran naik tajam, keberadaan tanaman penghasil sayur-mayur di depan rumah akan cukup berguna untuk membuat semua orang di dalam keluarga tetap bisa makan tiga kali sehari.

Setiap teks yang hanya merawikan capaian-capaian gemilang petani perempuan, tanpa menunjukkan kelemahan, kekurangan, bahkan penderitaan apa saja yang dialami selama upaya mewujudkan hal tersebut, bisa memberi kesan bahwa semua perempuan bisa memperoleh segala hal dengan enteng—yang mana kemudian tak patut terlalu dipresiasi. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum: setiap perjuangan yang berhasil akan didahului oleh bermacam kesusahan (penderitaan). Dalam buku ini kami juga akan memaparkan kesulitan-kesulitan para perempuan petani Gayo dalam usaha mereka

mewujudkan ketahanan pangan, serta bagaimana kemudian menggarap pengetahuan-pengetahuan dan sumber-sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

Semua orang tentu sudah tahu perempuan yang bekerja memainkan peran ganda: pencari nafkah dan pengurus keluarga (ibu rumah tangga). Yang satu akan menghambat yang lain, kecuali bisa ditemukan jalan keluar efektif dan saling mendukung keduanya yang sepiintas terlihat mustahil. Dalam hal ini, para perempuan petani Gayo tidak membuat solusi sendiri-sendiri. Masalah privat itu mereka atasi secara kolektif, karena memang yang keteteran sebagai ibu rumah tangga sekaligus petani bukan satu-dua orang saja. Hasil kecerdasan kolektif itu lantas menghadirkan koperasi petani yang tak cuma memiliki fungsi keekonomian tetapi juga fungsi perlindungan keluarga.

Mengenai pengetahuan, kami juga mengulas secara khusus petani perempuan Gayo lulusan fakultas pertanian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pengetahuan yang diperoleh lewat struktur kurikulum universitas berpengaruh pada naiknya tingkat keterampilan dan kompetensi. Keterjalinan pengetahuan pertanian dengan praktik bertani di ladang kami periksa lewat pertanyaan-pertanyaan khusus. Dan untuk konteks ini, kami juga akan memberikan sejumlah poin rekomendasi untuk peningkatan kualitas kurikulum pendidikan pertanian di universitas.

Kami berharap buku ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai peran vital perempuan petani dalam ketahanan pangan, sehingga melahirkan kebijakan yang lebih memihak perempuan dalam berbagai bidang. Untuk itu, kami berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Pertama, terima kasih kepada Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fithra Asean Eng, kepada pihak AKSI-ADB yang sudah mendukung penelitian sampai penerbitan buku, Koperasi Permata Gayo dan Koperasi Kopi Wanita Gayo yang telah memberikan data dan informasi yang kami butuhkan, para alumni yang ikut membantu penelitian, serta kepada semua pihak yang sudah mendukung terbitnya buku ini.[]

Gender & Pangan

Potret Perempuan Gayo sebagai Pilar Ketahanan Pangan Keluarga

Penulis:

Jullimursyida, Ph.D

Dr. Rozanna Dewi

Dr. Mawardati

Dr. Khalsiah

Dr. Yulia

Deassy Siska, M.Si

Editor:

Ayi Jufridar dan Bisma Yadhi Putra

Tata letak:.....

Desain sampul: Eriyanto

Foto sampul: Rahmad Yd.

Bagian 1

Tanah Gayo yang Makmur

Dataran Tinggi Gayo adalah tanah yang makmur dan indah. Wilayah pegunungan ini diberkahi sumber air melimpah, tanah subur, dan hawa sejuk yang berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Aceh. Dengan kondisi alam seperti itu, Gayo memiliki sejumlah potensi terutama di sektor pariwisata dan pertanian sehingga dikenal sebagai daerah yang memiliki berbagai destinasi wisata serta penghasil sayur mayur dan kopi.

Terletak di ketinggian 200 hingga 2.600 meter di atas permukaan laut (mdpl), bentang alam Tanah Gayo menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan—yang melintang nyaris ke seluruh wilayah Pulau Sumatra. Ini adalah karunia yang senantiasa disyukuri para penduduknya, baik pendatang—seperti suku Aceh pesisir dan suku Jawa—maupun penghuni asli yang disebut *Urang Gayo*. Iklim tropis di Tanah Gayo, didukung curah hujan, kelembaban, dan suhu dingin yang tinggi membuatnya amat cocok untuk macam-macam tanaman perkebunan, terutama sekali kopi.

Pertanian menghasilkan komoditas-komoditas yang menyokong perekonomian jutaan keluarga di sana. Yang paling diandalkan adalah biji kopi. Dari hasil menjual biji kopi, orang-orang Gayo bisa sekolah, masuk polisi, membangun rumah, membeli kendaraan, naik haji, menikah, memperluas lahan, membangun masjid, dan seterusnya.

Gayo adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Orang-orang suku ini berdomisili secara terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues. Wilayah inilah yang disebut dengan *Tanoh Gayo* atau Tanah Gayo (Khalisuddin dkk., 2012). Dua kabupaten yang pertama disebut berbatasan dengan Aceh Utara, sebuah kabupaten yang sudah bertahun-tahun menyandang predikat “kabupaten termiskin di Provinsi Aceh”.¹

¹ Status ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam rilis profil kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Aceh pada September 2019 (BPS Aceh, 2019). Secara keseluruhan, Aceh masih menduduki peringkat nomor satu sebagai wilayah termiskin di Sumatra dan nomor enam termiskin di Indonesia. Penetapan itu berlandaskan tiga indikator: pendapatan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi rawan pangan (BPS Aceh, 2018). Di wilayah Aceh Utara terdapat 27 kecamatan potensi alam yang berbeda-beda. Mayoritas kecamatan menjadikan pertanian padi di sawah sebagai sumber penghidupan. Baik sawah irigasi maupun tadah hujan.

Empat kabupaten yang disebut di atas adalah daerah-daerah konsentrasi suku Gayo. Artinya, orang-orang Gayo juga tersebar di sejumlah kabupaten lainnya yang tak masuk dalam *Tanoh Gayo*. Bersamaan dengan penyebaran tersebut, terpilah pula suku Gayo ke dalam sejumlah subsuku. Pecahan-pecahan ini mendiami baik *Tanoh Gayo* itu sendiri maupun kabupaten-kabupaten lainnya.

Berdasarkan pemilahan yang dibuat Khalisuddin dan kawan-kawan dalam *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*, suku Gayo terbagi ke dalam enam subsuku bangsa. Berikut daftarnya:

Sub-suku Gayo	Wilayah Domisili
Gayo Lut	Kabupaten Bener Meriah Sebagian Kabupaten Aceh Tengah
Gayo Deret	Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
Gayo Lues	Kabupaten Gayo Lues
Gayo Alas	Kabupaten Aceh Tenggara
Gayo Kalul	Kabupaten Aceh Tamiang
Gayo Lokop Serbe Jadi	Daerah Serbejadi di Kabupaten Aceh Timur

Orang-orang Gayo yang tinggal di luar *Tanoh Gayo* dapat dikatakan relatif terasing dari aktivitas pertanian, terutama tradisi bertani kopi. Jika identitas adalah struktur, maka kopi menjadi salah satu substruktur dalam identitas suku Gayo. Ada adagium yang menyatakan: “Kopi adalah Gayo. Gayo adalah kopi”. Penyair Gayo yang bermukim di Jakarta, Fikar W Eda, melukiskan kenikmatan kopi Gayo dalam bait-bait puisi yang dibacakan di berbagai pentas seni nasional bahkan internasional.

Historiografi kopi di Gayo umumnya menarik 1904 sebagai tahun permulaan masuknya kopi ke daerah ini. Benih kopi dibawa oleh Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan sistem tanam paksa (Wibowo, 2006). Ceritanya datang dari seorang Belanda bernama Adriaan van Ommen.

Ketika menelaah arsip *Hoge Regering* yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jajang Nurjaman (2019) mendapati bahwa Ommen merupakan orang yang pertama kali membawa bibit kopi Arabika ke Nusantara dan memperkenalkannya

kepada Vereenigde Oost-indische Compagnie (VOC). Waktu itu tahun 1696. Dari sinilah kemudian kopi ditanam di Hindia Belanda, lalu kemudian diketahui tempat terbaik untuk membudidayakannya adalah di dataran tinggi karena berhawa sejuk atau dingin.

Sebelum mulai menanam kopi pada akhir Abad ke-19, orang-orang Gayo bercocok tanam di sawah maupun kebun yang ditanami tumbuhan penghasil sayur mayur (Afadhal, dkk, 2008: 169-170). Sampai kini pun, walau kopi merupakan komoditas primadona, tumbuhan-tumbuhan pertanian lainnya tetap ditanam. Dalam perkembangan selanjutnya, kopi menjadi tempat bergantung hidup orang Gayo. Kopi dinisbahkan sebagai “hidup-matinya” orang Gayo. Dengan kopi, kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah terpenuhi karena komoditas tersebut digemari dengan tinggi di pasar lokal maupun internasional. Ketika hasil panen kopi mulai diekspor ke negara-negara Eropa maupun Amerika, para petani Gayo bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan hariannya, tetapi mereka juga mulai hidup dalam kegemilangan ekonomi.

Capaian ini tentu tidak terjadi tiba-tiba. Menurut sejumlah catatan lama dan pengakuan para tetua Gayo, mulanya memang terdapat banyak tanaman kopi tetapi tak seorang pun sadar bahwa biji kopi dapat diolah menjadi minuman segar yang bernilai lebih tinggi. Dalam *Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya*, Snouck Hurgronje membeberkan bahwa awalnya orang Gayo hanya tahu mengolah daun kopi menjadi teh. Senada dengan Hurgronje, orang-orang tua di Gayo menjelaskan perihal daun kopi Robusta yang dipanggang kemudian diseduh dalam air panas. Sebelum diminum, dicampurkan dengan gula aren. Hal ini berlangsung setidaknya dari 1939 sampai tahun 1960-an (Khalisuddin dkk, 2012).

“Kalau pun ada yang menanam pohon kopi saat itu hanya daunnya yang digunakan untuk direbus sebagai air minum yang berwarna teh. Sedangkan buah kopinya hanya digunakan sebagai buah isapan karena manis rasanya. Memasuki tahun 1960-an barulah masyarakat Aceh Tengah mulai tertarik membudidayakan tanaman kopi, hingga tahun 1975 sampai 1980-an budidaya tanaman kopi di Aceh Tengah menjadi suatu usaha baru yang sangat menarik bagi masyarakat, maka sejak itu semua masyarakat di dataran tanah tinggi Gayo mulai mengganti tanaman tebu dengan kopi” (Khalisuddin., dkk, 2012: 104).

Kini, nyaris semua orang Gayo bertani kopi. Baik secara modern maupun tradisional. Baik menjadikannya sebagai mata pencarian maupun sumber pendapatan sekunder/sampingan. Namun dalam perjalanannya, banyak orang Gayo yang meninggalkan pekerjaan untuk fokus menanam kopi. Hal ini berlangsung ketika kopi menjadi begitu prospektif karena keuntungan yang didapat lebih dari sekadar memadai; ketika kopi Gayo

semakin berkembang nilainya di tingkat dunia. Masa depan yang lebih cerah mulai tampak pada 2011. Tahun itu, kopi Gayo telah menjadi komoditas spesial yang diperdagangkan di pasar internasional. Mereka yang dahulunya sehari-hari bertani di sawah atau menjadi nelayan di Danau Lut Tawar, kemudian mulai menanam kopi.

Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian kopi di Gayo juga hasil ketekunan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Program-program yang dirancang-laksanakan bertujuan untuk menjadikan pertanian punya wawasan berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan menggambarkan sistem pertanian yang mampu mempertahankan produktivitas dan kegunaannya bagi masyarakat tanpa batas. Sistem seperti ini dalam sejumlah kasus menuntut penghematan sumber daya, mendukung secara sosial, kompetitif secara komersial, dan ramah lingkungan.

Banyak komunitas pertanian telah mengadopsi konsep pertanian berkelanjutan. Bagi mereka, hal tersebut cukup urgen. Keberlanjutan telah menjadi komponen integral dari kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian, komersialisasi hasilnya, dan nirlaba. Semua itu mulai dijalin ke dalam kebijakan pertanian yang terpadu. Semakin banyak petani menggabungkan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif ke dalam usaha mereka sendiri (Gold, 2007).

Kebijakan ketahanan pangan memang lebih banyak mengacu pada pemerintah. Padahal peran serta aktor lain seperti akademisi dan lulusan perguruan tinggi diperlukan untuk dapat secara mandiri membantu masyarakat mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Dalam hal ini, perguruan tinggi juga memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sebagaimana tertuang dalam Tridarma Perguruan Tinggi terdapat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengajaran kepada mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan sarjana unggul dan mampu bersaing di dunia kerja global.

Selain itu, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah menciptakan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi pertanian, misalnya dengan teknologi pertanian tepat guna, benih unggul, pupuk, sampai optimalisasi teknologi komunikasi untuk pemasaran hasil pertanian. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi berperan dalam mentransfer inovasi teknologi penelitian yang telah dilakukan agar masyarakat dapat

memahami dan menggunakan teknologi tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian rakyat (Shamadiyah & Martina, 2018).

Pertanian komersial telah meningkatkan pendapatan dan standar hidup petani, sehingga mengurangi kemiskinan di antara sebagian besar penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Orang Indonesia terlibat dalam produksi beragam tanaman komersial: kelapa sawit, tebu, teh, tembakau hingga beras, kakao, dan rempah-rempah. Kopi telah menjadi tanaman komersial yang penting karena memiliki pangsa pasar yang luas. Indonesia adalah produsen global terbesar keempat atau 6 persen dari pasokan kopi dunia sebesar 739.000 ton (USAID Green Invest Asia 2019; Kansrini, Zuliyanti, Mulyani, dan Pirmansyah, 2020). Sebesar 86 persen kopi Arabika Indonesia ditanam di Lintong, Sumatera Utara; Kintamani di Bali; dan di Gayo, Provinsi Aceh (Mega Amelia Putri dkk. 2013).

Ada indikasi mengkhawatir dalam pembangunan pertanian, yaitu ketika pertumbuhan penduduk yang tinggi sekali lagi memberikan tekanan pada pasokan dan permintaan beras. Sementara beras merupakan makanan pokok bagi jutaan orang di Asia. Isu-isu yang muncul termasuk meningkatnya kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan air, komersialisasi pertanian, tekanan untuk meliberalisasi perdagangan beras, tekanan pada basis sumber daya, masalah spesifik lokasi, dan perubahan pola konsumsi makanan.

Semuanya pasti berimplikasi pada banyak orang, terutama petani perempuan (miskin) di perdesaan. Mengubah sumber daya lahan yang langka di Asia harus menghadapi tantangan tambahan: bagaimana secara bersamaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, air, dan pupuk kimia sambil tetap melestarikan kesehatan lingkungan atau kondisi tanah. Dunia akan membutuhkan lebih banyak beras—sekitar 60 persen lebih banyak daripada produksi global saat ini—untuk memberi makan miliaran orang (IRRI, 1997).

Pertanian berkelanjutan harus berselaras dengan keseimbangan pelestarian lingkungan, produksi pertanian, keuntungan pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan penyeimbangan yang diperlukan oleh pertanian berkelanjutan menjadi lebih sulit karena memerlukan lebih dari sekadar ukuran keberhasilan tunggal. Membangun pertanian yang lebih berkelanjutan juga membutuhkan partisipasi petani yang tinggi karena keluarga tani mewujudkan kompleksitas berbagai tujuan di tingkat mikro.

Pertanian berkelanjutan memerlukan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan meliputi: (i) metodologi pendidikan yang berkontribusi memperkuat dan meningkatkan kemampuan individu, sosial, dan organisasi; (ii) membangun kesepakatan dengan pemangku

kepentingan yang berbeda dengan komitmen khusus; (iii) menghubungkan perempuan sebagai agen perubahan strategis dan pembangunan sosial; (iv) menggabungkan media komunikasi untuk menerima informasi yang berkualitas; dan (v) pendekatan transdisipliner (Cuéllar-Gálvez et.al., 2018).

Di dalam pembangunan pertanian, hal yang menjadi keniscayaan adalah membuat petani menjadi berdaya. Namun pemberdayaan juga amat bergantung pada mau-tidaknya orang berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan. Dalam hal ini, faktor sosial budaya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan, norma, masyarakat, pengetahuan, dan persepsi tentang program (Shamadiyah, 2010). Meningkatkan kemampuan dan minat untuk berpartisipasi tidak dapat diasumsikan bahwa semua aktor memiliki kapasitas sama. Beberapa orang mungkin meremehkan waktu dan energi yang diperlukan untuk berpartisipasi dengan cara yang berarti, sementara yang lain cukup antusias tetapi mungkin tidak memiliki sarana untuk terlibat sejak awal (Stokols et al. 2010).

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani menyuarakan kebutuhannya, pendapat, gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Rusmiyati dalam Wulandari (2014), pemberdayaan adalah cara orang, organisasi, dan masyarakat untuk dapat menguasai kehidupannya. Pemberdayaan juga berarti partisipasi dalam peristiwa dan lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut Sumodiningrat (dalam Theresia, dkk., 2014), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat mandiri melalui manifestasi kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kekuatan itu sendiri, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki setiap orang serta berusaha untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan mencerminkan perspektif baru dalam pembangunan yang bersifat memberdayakan, berkelanjutan, dan—yang lebih penting—*people centered* (Chambers, dalam Norr, 2011).

Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi pengertian *community development* dan *community based development*. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah

masyarakat dijadikan sebagai subjek, bukan objek, dalam kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah persiapan penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dengan suasana berkelanjutan sehingga nantinya partisipan terbebas dari belenggu-belenggu ketidakberdayaannya (Soebiato, 2013). Bentuk-bentuk ketidakberdayaan itu seperti kemiskinan, kekuarangan pangan, tidak punya pekerjaan, kesulitan keuangan, dan sebagainya.

Kerawanan versus Ketahanan Pangan

Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah terwujudnya ketahanan pangan, baik di tingkat orang per orang, keluarga, hingga masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan adalah hak asasi manusia. Pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dari kebutuhannya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di sebuah negara. Berbagai gejolak sosial dan politik juga dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu bahkan bisa menuju menjadi negara yang gagal (*failed state*). Bagi Indonesia, makanan sering diidentikkan dengan nasi karena jenis makanan ini merupakan makanan pokok utama di sebagian besar daerah.

Mengingat pentingnya beras, pemerintah selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangan berbasis beras terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran penduduk yang luas dan persebaran geografis. Pengertian ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: “Kondisi pemenuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan tidak hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan

dengan swasembada pangan dan keamanan pangan. Tiga pilar ketahanan pangan yang terkandung dalam definisi tersebut adalah ketersediaan, aksesibilitas fisik dan ekonomi, serta stabilitas yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan di semua tempat. Jika ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga akan mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Mengacu pada definisi di atas, masalah ketahanan pangan dapat terjadi apabila salah satu unsur ketahanan pangan terganggu. Namun pada kenyataannya pengertian ketahanan seringkali direduksi hanya untuk menekankan pada unsur pasokan dan harga (*supply and price*). Bahkan ada yang menekankan pada aspek yang lebih sempit, yakni menyamakan pengertian “ketahanan pangan” dengan “swasembada pangan”.

Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat diwujudkan secara bersama dan seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik dekat dengan konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya. Sementara pilar stabilitas dapat dilihat dari kesinambungan pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan oleh rumah tangga kapan saja dan di mana saja (Badan Logistik Indonesia, 2014).

Sistem sosial-ekologis saat ini juga menghadapi berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti degradasi ekosistem, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perubahan iklim, ketidaksetaraan kekayaan, dan konflik manusia. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensi yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktivitas yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Muyassir, 2010).

Tantangan-tantangan yang saling berhubungan ini mengancam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Kates dan Parris, 2003; Rockstrom et al., 2009 dalam Brandt et al., 2013). Kepentingan yang berbeda menawarkan analisis yang saling berselisih. Beberapa memberi penekanan pada pasar, yang lainnya mementingkan warga negara. Beberapa melihat peran negara sebagai fasilitatif, yang lain sebagai penindas. Beberapa melihat harga sebagai pengumpul semua nilai, yang lain sebagai biaya eksternalisasi yang harus diinternalisasi. Beberapa melihat ketahanan pangan sebagai masalah negara berkembang semata, yang lain sebagai tantangan terhadap sistem pangan dunia dengan cara

yang berbeda sesuai dengan tingkat pembangunan. Dalam debat kebijakan ini, kini banyak aktor dan lembaga yang terlibat. Sebagian besar wacana ketahanan pangan masih tentang pemerintah, petani, dan orang miskin (Lang dan Barling, 2012).

Ketahanan pangan rumah tangga petani merupakan tujuan utama dari adanya kegiatan produksi dan sebagai motivasi utama petani dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya. Ketahanan pangan rumah tangga akan dapat mencerminkan ketahanan pangan regional dan regional suatu wilayah.

Kontribusi Perempuan dalam Ketahanan Pangan

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan keluarga petani sehingga tercapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak lepas dari peran perempuan. Perempuan terlibat dalam kegiatan produksi (dalam pertanian), pengolahan makanan, dan distribusi makanan. Mereka tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab utama untuk menyediakan makanan bagi seluruh anggota keluarga (Novia, 2015). Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan merupakan faktor penentu ketahanan pangan bagi keluarganya, mulai dari proses produksi di lahan pertanian, pemasaran, hingga penyediaan (Shamadiyah & Nasution, 2018).

Kontribusi perempuan dalam perikanan dalam penelitian Harper et.al (2013) menyebutkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, perempuan sering diabaikan dalam manajemen dan analisis ekonomi. Di sebagian besar masyarakat, perempuan berkontribusi secara signifikan terhadap makanan yang mengandung protein untuk keluarga mereka, dan aktivitas perempuan di bidang perikanan dapat menambah nilai ekonomi yang substansial pada ikan yang ditangkap dan didaratkan oleh laki-laki.

Baliki et. Al (2019) dari Bangladesh membuktikan bahwa pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pemasaran produk pertanian berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan keluarga. Penguatan perempuan dan pemuda melalui program pelatihan berbasis masyarakat dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan (Mapiye et.al, 2019). Pemberdayaan perempuan dan pemuda merupakan salah satu strategi signifikan yang telah terbukti meningkatkan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga (Njuki, et.al, 2011; Galié, et.al, 2019).

Semua orang di dalam keluarga petani berkontribusi menurut perannya masing-masing. Mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan, panen, hingga pemasaran. Terutama sekali dalam “keluarga petani kopi murni”, yakni keluarga yang memang menjadikan bertani kopi sebagai pekerjaan utama (bukan sampingan seperti para PNS, misalnya, yang memiliki lahan pula baik yang digarap sendiri maupun digarap orang lain).

Dengan keuntungan dari menjual hasil panen kopi, yang terpenting bagi para petani Gayo adalah terwujudnya ketahanan pangan dalam keluarga mereka. Ketika semakin banyak keluarga yang menikmati tren positif ini, maka tampaknya ketahanan pangan di tingkat komunitas atau masyarakat. Kondisi ini ini bisa dilihat secara kasat mata dalam perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat Gayo.

Konteks Gender dalam Ketahanan Pangan

Konsep gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki sebagai akibat benturan budaya atau lingkungan masyarakat. Sehingga muncul dikotomi feminin (perempuan) dan maskulin (laki-laki). Di masyarakat perempuan digambarkan dengan sifat-sifat femininnya, seperti “lemah”, “pemalu”, “penakut”, “emosional”, atau “gemulai”. Sebaliknya laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulinnya seperti “gagah”, “perkasa”, “tegar”, “berani”, “rasional”, dan “kokoh”.

Feminitas dan maskulinitas ini sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial, bukan hal yang kodrati. Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (Depdiknas, 2003: 2). Akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, antara lain:

1. Pemberian beban kerja yang lebih berat kepada perempuan, khususnya perempuan pekerja.
2. Adanya anggapan bahwa perempuan tidak penting, melainkan sekadar pelengkap dari kepentingan laki-laki.
3. Pelebelan negatif (wujud stereotip) yang diletakkan pada perempuan.
4. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan yang belakangan ini kian mencemaskan.

Bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender ini terjadi karena belum tumbuhnya kesadaran dan kepekaan masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Konsep gender

diperoleh melalui proses interaksi dalam dunia sosial dan berbeda dari konsep seks atau jenis kelamin yang lahir sebagai suatu fakta alamiah.

Berangkat dari anggapan bahwa tatanan peradaban yang berubah bergerak dari alam (perempuan) ke budaya (laki-laki), maka perempuan harus keluar dari kancah domestik dan masuk ke kancah publik untuk menjadi “manusia” yang beradab. Mengarusutamakan perempuan untuk terlibat aktif di kancah publik adalah keniscayaan. Teknologi yang diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem kerja seringkali disesuaikan dengan kondisi laki-laki untuk menunjang produktivitas mereka. Demikian pula rancangan sistem kerja yang relatif tidak mendukung kegiatan ekonomi tradisional perempuan dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sektor domestik.

Akibatnya, perempuan (didesak) mencari penyesuaian untuk masuk ke sektor publik dengan berpartisipasi sebagai pekerja industri. Sementara di sektor publik (industri) ini mereka harus mengalami kondisi kerja yang buruk, dianggap memiliki produktivitas yang rendah, sehingga hanya mendapatkan upah yang rendah (Esterik 1996; Putranti 2004). Representasi gender dalam kehidupan masyarakat kini harus dipahami tidak hanya mencakup citra dan tekstual pengalaman sosial modern, tetapi juga proses produksi, sirkulasi, dan konsumsi (Brooks, 2011).

Beberapa pendapat ahli yang mengkaji gender mendefinisikan gender antara lain:

- Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peranan, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial-budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
- Gender adalah suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, dan bersifat relasional karena feminitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah yang menjadikan berbeda.
- Gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dipelajari, bervariasi secara luas diantara masyarakat dan budaya dan berubah sejalan dengan perkembangan waktu/zaman (*International Labour Office* (ILO), 2000).

Dari definisi di atas, kebudayaan di dalamnya mencakup adat istiadat, aturan, fakta, mitos, dan harapan-harapan untuk berperilaku, menjadi sumber kekuasaan yang

memengaruhi persepsi masyarakat tentang gender. Menurut Yustina Rostiawati (2004), perlu disadari bahwa gender merupakan konsep yang relasional-resiprokal (timbang-balik). Artinya feminitas dan maskulinitas hanya bermakna jika ada bersama. Masyarakat mendefinisikan feminitas yang dikontraskan dengan maskulinitas, demikian pula sebaliknya. Jika pemaknaan salah satu berubah, maka yang lain turut berubah. Perubahan ini tidak begitu saja terjadi. Setiap orang sebagai bagian dari masyarakat budaya tertentu, turut menentukan perubahan tersebut dengan menerima atau menolak pemaknaan gender yang ada. Penerimaan atau penolakan ini berlangsung saat mereka berelasi satu sama lain.

Jika ditelusuri, sosialisasi gender berlangsung sejak seseorang masih dalam kandungan. Warna biru dan merah muda merupakan tanda awal untuk membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika ia dilahirkan. Dalam perkembangannya, nilai-nilai budaya turut melestarikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Anak-anak perempuan biasa mendapat boneka dan peralatan memasak untuk bermain peran sebagai ibu. Sementara anak laki-laki memperoleh bola dan mobil-mobilan untuk berlatih ketangkasan dan menjadi anak yang aktif. Meningkat usia remaja, perempuan membelanjakan uang tabungannya untuk baju dan alat-alat kosmetika, sedangkan laki-laki menghabiskan uang jajannya untuk membeli peralatan olahraga.

Demikian pula pada usia sekolah, sosialisasi gender berlanjut dan dipertegas oleh para guru/pendidik mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Aktivitas, tugas, pemberian pujian-hukuman (*reward and punishment*), serta tingkah laku guru/pendidik mengandung pesan tambahan bagi pengembangan peran gender yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin peserta didik. Pada umumnya pesan-pesan dari guru/pendidik itu mendukung apa yang telah diperoleh di rumah dan menguatkan pembentukan gender sesuai dengan jenis kelaminnya.

Dengan demikian dapat dilihat peran berbagai pihak sepanjang kehidupan manusia dalam perkembangan identitas gender. Keluarga merupakan pihak pertama dan terpenting di dalamnya. Dalam keluarga pulalah tempat dimungkinkannya perubahan peran dan pemaknaan gender. Selanjutnya guru/pendidik, teman sebaya menjadi pihak kedua yang penting dalam perkembangan identitas gender seseorang.

Perbedaan jenis kelamin telah memengaruhi manusia untuk memberi persepsi identitas peranan gender atau mengakibatkan perubahan peranan gender. Dikaitkan dengan sifatnya, kita mengenal istilah feminin vs maskulin, sementara dikaitkan dengan perilaku masing-

masing dalam konteks peranannya dalam keluarga dan masyarakat, yakni laki-laki sebagai pencari nafkah, pemimpin keluarga dan masyarakat, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan gender tersebut sepanjang sejarah telah menimbulkan adanya permasalahan yaitu ketidakadilan gender.

Dari diagram di atas dapat dipahami bahwa proses konstruksi gender yang terjadi selama ini bukanlah suatu proses yang sederhana sebagai suatu proses “proses diferensiasi gender” yang menghasilkan dua peranan gender antara laki-laki dan perempuan yang terpisah tetapi seimbang juga merupakan suatu proses pengsubordinasian perempuan, baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat (termasuk kelembagaan pendidikan), dan negara. Stereotip menjadikan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan (termasuk kebijakan bidang pendidikan) tidak memperhatikan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif. Sebagai akibat yang lebih luas lagi perempuan termarginalisasikan, domestikasi dalam pembangunan. Bahkan perempuan menjadi objek kekerasan baik dalam keluarga/rumah tangga, masyarakat, dan negara.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 yang berbunyi Sekolah Dasar (SD) mulai dilakukan secara intensif sejak tahun 1973, melalui pemerataan berbagai fasilitas pendidikan. Kemudian Program Wajib Belajar Enam Tahun pada 1984 dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada 1994. Hasilnya pada tahun 1999/2000 Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 94,96 persen, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 72,60 persen. Perluasan kesempatan belajar di SD dan SLTP ini memengaruhi peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah hingga 37,60 persen dan pendidikan tinggi hingga 10,00 persen (Bappenas, 2001: 1).

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Depdiknas, 2003) menunjukkan perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 36,90 persen, sementara penduduk laki-laki 46,00 persen. Kemudian penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi baru sekitar 03,06 persen atau lebih rendah dari penduduk laki-laki yang mencapai 04,17 persen. Selain itu persentase penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 23,10 persen, lebih tinggi dari penduduk laki-laki yang mencapai angka 10,70 persen.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan masih dapat dipahami dan dianggap wajar, jika perbedaan tersebut masih terbatas karena perbedaan jenis kelamin. Yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effects*), yaitu perbedaan kesempatan atau perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Efek diskriminasi gender tersebut mungkin saja tidak sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau kelompok orang, tetapi terkonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, peraturan, mekanisme, dan prosedur baku.

Diskriminasi terhadap perempuan tentu menegasikan peran mereka yang cukup vital. Dalam konteks ketahanan pangan, perempuan adalah pilarnya. Dalam keluarga-keluarga petani, perempuan memainkan peran publik yang tidak sedikit untuk menyukseskan pertanian keluarga, yang mana dari itu mereka bisa memperoleh pendapatan guna menciptakan daya tahan pangan keluarga.

Bagian 2:

Perempuan sebagai Pilar Ketahanan Pangan Keluarga dan Masyarakat

Pagi-pagi sekali, para perempuan Gayo sudah bangun dan mulai bersiap ke ladang. Namun sebelumnya mereka harus menyiapkan sarapan, mengurus anak yang hendak ke sekolah, membersihkan rumah, serta menyelesaikan berbagai pekerjaan domestik lainnya yang tidak digantikan laki-laki. Setelah urusan rumah tangga beres semua, barulah kiprah mereka dalam ketahanan pangan keluarga—dan juga komunitasnya—dimulai.

Di tengah sinar mentari yang masih redup dan berpadu dengan hawa dingin, para perempuan mulai beranjak ke kebun. Dibawah bermacam perkakas pertanian yang sesuai dengan peran mereka di lahan. Kalau hendak memetik kopi, misalnya, tentu yang dibawa adalah penggunting ranting serta wadah tempat menyimpan hasil panen tersebut.

Dalam sejarah umat manusia, tiada satu pun masyarakat yang mampu mencukupi pangan tanpa peran perempuan. Perempuan menduduki peran yang melampaui sebagai pengolah pangan. Mereka menjadi pihak yang secara aktif memperjuangkan ketersediaan pangan untuk keluarga dan komunitasnya, tanpa menegasikan posisinya sebagai pengolah pangan. Sampai hari ini, kita masih bisa menemukan perempuan yang melakukan hal tersebut; mereka turun ke ladang, kantor, atau jalanan untuk memperoleh makanan, lalu pulang ke rumah untuk mengolahnya jadi makanan yang layak bagi keluarga.

Dengan tugas domestik dan pekerjaan di kebun kopi, para perempuan Gayo bisa disebut sebagai pahlawan pangan bagi keluarganya. Bersama laki-laki, mereka turun ke ladang untuk memastikan tanaman pangan mereka baik keadaannya sampai tiba waktu panen. Tak bisa disangkal, pertanian di Gayo terbangun karena ada andil besar perempuan di dalamnya. Dalam praktik bertani sehari-hari, mereka menjadi pembersih ladang dan pemetik kopi saat panen. Semua itu sudah dilakoni para perempuan Gayo sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, dan akan terus berlangsung di masa mendatang. Kalau kita menelusuri kebun-kebun kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah, kita akan menyaksikan para perempuan di antara barisan pohon kopi mini yang tingginya sekitar 2-3 meter saja sehingga mereka mudah memanen. Dengan kepala yang tertutup kain, tangan-tangan perempuan Gayo begitu lincah memetik biji kopi yang sudah matang.

Sebagian besar perempuan bertani kopi. Tentu saja kopi bukan makanan pokok. Ia tak dapat menggantikan budaya makan nasi. Tetapi hasil panen kopilah yang menjadikan keluarga mereka bisa memperoleh pendapatan untuk memenuhi pangan keluarga; mereka bisa membeli beras, ikan, daging, dan sayur mayur yang tidak ditanami di ladang sendiri. Dalam konteks ini, perempuan Gayo berandil besar memenuhi pangan keluarga melalui pemanfaatan hasil perkebunan.

Banyak penelitian membuktikan, perempuan memainkan peran penting dalam pertanian dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Maka untuk memungkinkan perempuan memenuhi potensi mereka dalam produksi, otoritas nasional maupun internasional perlu mengambil langkah-langkah kebijakan seperti peningkatan akses ke sumber daya, teknologi, dan informasi (terutama informasi pasar). Pembuat kebijakan harus meningkatkan kemampuan perempuan untuk menghasilkan pendapatan. Dibutuhkan adanya kebijakan afirmasi untuk mendorong optimalisasi peran perempuan dalam hal pangan sebagaimana dalam bidang politik. Hal itu tentu berdampak pada semakin baiknya ketahanan pangan dan gizi rumah tangga. Strategi harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perempuan baik dalam pekerjaan yang dibayar maupun dalam produksi rumah tangga. Kesejahteraan perempuan berarti kesejahteraan keluarga; yang mana tentu saja mencakup kesejahteraan anak-anak mereka (Quisumbing, 1994).

Dalam isu ketahanan pangan keluarga, perempuan adalah orang yang mengambil keputusan untuk memilih makanan, mengolahnya secara higienis, dan memilih kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pengetahuan tentang makanan sehat dan pemenuhan kebutuhan gizi, cara pengolahan, dan kebutuhan rumah tangga menjadi penting bagi mereka. Malahan di kalangan aktivis perempuan internasional terdapat credo: “Tak ada feminisme, maka tak akan ada kedaulatan pangan”.

Pernyataan itu didengungkan oleh Majelis Perempuan Internasional pada 2017 silam. Zubaidah Tambunan, seorang petani perempuan asal Sumatra yang hadir dalam konferensi tersebut, turut mencetuskan kepercayaan tersebut. Dia mengatakan: “Kurangnya pendidikan, kurangnya keterlibatan perempuan dalam organisasi maupun pemerintahan, (petani) perempuan selalu mendapat diskriminasi baik di keluarga maupun di masyarakat, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, adalah permasalahan umum yang terjadi dimana-mana”.

Di samping itu, petani perempuan juga kerap menjadi korban kriminalisasi dalam setiap konflik lahan. Padahal petani perempuan selalu berada di garda terdepan dalam perjuangan mempertahankan lahan (<https://spi.or.id/tak-ada-feminisme-tak-ada-kedaulatan-pangan-majelis-perempuan-internasional-ke-5-la-via-campesina/> diakses pada 20 November 2021, pukul 23.05 WIB). Apa yang juga menarik dari pidato Zubaidah adalah pernyataannya yang menyebutkan bahwa “petani perempuan adalah ibu kedaulatan pangan”.

Potensi perempuan dalam pembangunan pertanian memang sangat strategis. Bahkan kontribusi pendapatan perempuan di pedesaan terhadap pendapatan rumah tangga sangat besar. Dalam keluarga rumah tangga petani di Indonesia sebagian besar adalah perempuan, istri atau ibu, yang juga berkecimpung di sektor pertanian. Namun pada kenyataannya peran perempuan di sektor pertanian seringkali terpinggirkan akibat budaya patriarki yang berkembang di masyarakat yang menyebabkan pembagian kerja dan tingkat gaji menjadi timpang dalam konteks menyulitkan kehidupan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran perempuan dalam pertanian, mereka terlibat dalam kegiatan pertanian berat seperti mengolah sawah, serta kegiatan pertanian ringan seperti mengolah pekarangan pertanian (Priminingtyas & Yuliati, 2015).

Petani perempuan Gayo terlibat dalam kegiatan penggarapan lahan (*on farm*), pengolahan hasil pertanian, hingga distribusi makanan. Mereka tidak hanya memproduksi pangan, tetapi juga menjadi penanggung jawab utama pemenuhan gizi bagi seluruh anggota keluarga. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan merupakan faktor penentu ketahanan pangan bagi keluarganya, mulai dari proses produksi di lahan pertanian, pemasaran hingga penyediaan pangan dan bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi keluarga sehingga perempuan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam ketahanan pangan keluarga (Shamadiyah & Nasution, 2018).

Besarnya produksi pertanian tergantung pada luas lahan yang dimiliki, kualitas, dan cuaca, serta pengetahuan dalam aspek pertanian. Hasil panen dijual dan terkadang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Pasar untuk hasil pertanian selalu ada, tetapi tidak ada jaminan harga. Peluang petani untuk menjual hasil panennya sebenarnya sangat besar, namun terkadang permainan pasar sangat mengganggu petani yang mengharapkan harga sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Pemasaran hasil pertanian terkadang juga dijual kepada pedagang besar atau dikenal dengan istilah “tauke” untuk menutupi utang sebelum panen (biasanya untuk membeli alat-alat produksi seperti peralatan, pupuk, pestisida, atau

kebutuhan keluarga) sehingga petani hanya memperoleh keuntungan yang kecil. Permainan harga menjadi pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan karena menimbulkan ketimpangan antara harga komoditas pertanian dengan tingkat kesejahteraan petani.

Saluran pemasaran melalui agen tidak terlalu menguntungkan dalam hal pendapatan karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Akan tetapi ini adalah saluran pemasaran tercepat dan agen datang langsung ke lahan mereka untuk mengambil produk pertanian. Dengan demikian petani tak perlu repot-repot memikirkan transportasi untuk penjualan.

Selain agen, saat ini beberapa petani telah bergabung dengan koperasi petani untuk menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih adil, di tengah peran koperasi yang semakin kecil sebagai pilar ekonomi nasional. Ada juga konsumen yang datang langsung ke petani untuk membeli, namun hal ini sangat jarang terjadi.

Perempuan Gayo senantiasa memastikan dan mengontrol ketersediaan pasokan bagi dirinya sendiri serta anggota keluarganya. Misi paling fundamental dalam hal ini adalah bagaimana memastikan semuanya bisa makan tiga kali sehari dan kemudian baru kemampuan untuk memenuhi gizi seimbang. Pemerolehan bahan makanan tidak sulit. Semua yang dibutuhkan ada di pasaran, dan sebagiannya bisa diperoleh dari kebun sendiri. Para petani perempuan biasanya belanja 3-4 kali dalam seminggu. Konsumsi beras setiap bulan berkisar 20-30 kilogram. Hal ini tergantung jumlah anggota keluarga. Sementara untuk sayur mayur, yang bisa ditanam sendiri di kebun seperti labu, daun singkong, tomat, cabai, dan seterusnya. Bukan hanya di kebun, tanaman-tanaman konsumsi juga ditanam di pekarangan rumah biar jumlahnya lebih memadai. Sangat jarang ada petani yang memelihara hewan ternak, kecuali beberapa keluarga yang memiliki kuda dan masih digunakan untuk membajak sawah. Karena itulah untuk konsumsi daging-dagingan sepenuhnya mengandalkan stok—dan harga yang terjangkau—di pasar.

Walaupun kudapan yang tersedia beranekaragam, hal ini belum berarti di kalangan petani Gayo telah berjalan diversifikasi pangan. Namun berdasarkan perilaku-perilaku konsumsi yang dipaparkan, dapat diasumsikan bahwa memang diversifikasi pangan tidak ada. Keluarga-keluarga petani amat bergantung dengan bahan-bahan makanan yang beragam tersebut. Keanekaragaman makanan tersebut stagnan dalam variasinya. Situasi ini sebenarnya sudah cukup menguntungkan. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga atas beberapa bahan pokok, jenis bahan pokok lainnya masih bisa dijangkau tanpa memberatkan keuangan keluarga.

Apa yang dilakukan para perempuan Gayo jika terjadi krisis pangan?

Proteksi atas terjadinya krisis pangan dilakukan secara berlapis-lapis. Sekiranya kebun mengalami gagal panen, penurunan jumlah produksi secara signifikan, atau nilai komoditas jatuh di pasaran, para perempuan kadang terpaksa meminjam uang dari tetangga/keluarga besar/teman untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga atau mengambil simpanan/pinjaman dari bank.

Untuk menjamin stabilitas pangan dalam keluarga mereka, mereka akan menggunakan pekarangan untuk menanam sayuran jika tidak ada pendapatan untuk membeli makanan atau mengambil pekerjaan lain. Sebenarnya, bertani adalah pekerjaan kedua. Mereka memiliki pekerjaan utama lain dan pendapatan dari pekerjaan utama mereka lebih besar daripada menjual produk pertanian.

Tetapi rata-rata petani perempuan memiliki tabungan (*saving*) mumpuni yang bisa diandalkan dalam kondisi darurat. Inilah kebijaksanaan petani perempuan, secara tradisional mereka memiliki sikap yang gigih dalam menabung secara konsisten. Jatuhnya harga kopi di pasaran yang berpotensi menciptakan kerawanan pangan juga tak pernah dipusingkan. Hal ini karena bertani sebetulnya cuma pekerjaan kedua. Sebagian kepala keluarga maupun perempuan memiliki pekerjaan utama lainnya, seperti pegawai negeri, pedagang, atau nelayan di Danau Lut Tawar. Jadi ketika aspek pertanian merosot, yang jatuh adalah tiang penyangga ketahanan pangan kedua. Sementara tiang utama masih dapat diandalkan.

Ada beberapa faktor yang menentukan kedudukan para petani di lingkungan sosial. Hal yang paling utama tentu saja kepemilikan lahan. Di sini, tingkat luas lahan bisa menentukan lebih banyak aspek sosial. Semakin luas lahan seseorang, bisa jadi ia akan memperoleh presitise lebih tinggi.

Di luar itu, ada juga faktor lain yang tidak berhubungan dengan konteks perkebunan atau pertanian. Kalau seorang petani memiliki pengetahuan agama yang “tinggi”, ia memiliki peluang besar untuk diangkat sebagai pemimpin komunitas. Ia akan dihadirkan dalam setiap aktivitas-aktivitas desa dan ritual-ritual keagamaan yang berkaitan dengan pertanian. Oleh karenanya, perpaduan antara “penguasa” lahan dan religiositas bisa menempatkan seseorang di level elite dalam stratifikasi sosial. Predikat *high influencer* bakal disandanginya dan menjadi referensi bagi masyarakat.

Tidak semua petani perempuan memiliki “darah” Gayo. Sebagian adalah perempuan dari etnik lain. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Gayo menikahi orang yang berasal dari desa dan etnik lain adalah sesuatu yang jamak terjadi. Tidak ada kebijakan atau norma sosial yang melarang itu. Baik laki-laki maupun perempuan Gayo boleh mengawini orang non-Gayo. Pernikahan tidak sesuku berpengaruh pada budaya, agama, dan ekonomi. Hanya saja perempuan Gayo yang menikahi laki-laki dari suku lain harus mengikuti suaminya, sehingga ada kemungkinan ia akan terjauhkan dari aktivitas berkebun sebagai tindakan ekonomi maupun budaya.

Baik dalam perkara krisis pangan maupun ketahanan pangan, para petani perempuan Gayo memiliki solidaritas. Solidaritas ini bahkan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari, bukan baru muncul ketika ada masalah yang melanda sebagian atau semua dari mereka. Hal ini digambarkan oleh Khalisuddin dkk (2012):

“Kaum perempuan di tanah Gayo memiliki tradisi yang tanpa disadari memperkuat ikatan kekerabatan. Biasanya perempuan Gayo secara berkelompok mengutip. Jika kebun seorang petani kopi sedang berbuah banyak pemilik kebun khususnya perempuan, mengajak ibu-ibu tetangganya untuk bekerja di keburunnya. Ada dua sistem kerja yang berlaku dalam masyarakat petani kopi Gayo, yaitu sistem *ongkosen* dan *mango lo*”.

Ongkosen adalah sistem yang memberi upah kepada petani lain yang “membantu” mengutip hasil panen. Besaran upahnya pun cukup variatif. Ini ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengutip. Misalnya dalam setiap kaleng berisi 12 kilogram hasil panen upah yang diberikan kepada pengutip adalah 1 bambu atau 1,2 kilogram dari total tersebut.

Selain mengupah dengan hasil panen, ada juga pengupahan yang memakai uang tunai. Di kawasan Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, setiap kaleng berisi hasil panen diupah Rp10.000 sampai Rp20.000. Namun kondisi akses ke kebun yang berat, juga tingkat kemiringan kebun, bisa membuat upah lebih tinggi. Kesepakatan yang berbeda-beda muncul karena ada kebun yang medannya cenderung datar, dan lainnya “berada di kawasan pegunungan dengan akses yang sulit”.

Sementara *mango lo* adalah bentuk kerja sama berdasarkan giliran membantu. Misalnya, setelah petani A membantu memetik hasil panen di kebun petani B, selanjutnya petani B akan membalas jasa petani A dengan membantu memetik hasil panen di kebun petani A (Khalisuddin dkk., 2012). Sistem kerja sama antarpetani seperti ini juga sudah berlangsung secara turun-temurun di daerah lain di Aceh, meski dengan nama berbeda. Sebut saja di

Kabupaten Bireuen yang masih tetangga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Di sana kerja sama untuk saling membantu mulai dari menyemai benih padi sampai panen, disebut *meu-urup*, kendati di tengah dirupsi teknologi ke sektor pertanian, budaya *meu-urup* kian terkikis.

Pembagian Peran/Kerja Berbasis Gender

Pembagian peran kerja dalam keluarga petani Gayo diajarkan oleh orangtua secara turun-temurun. Hasil wawancara dengan para informan membuktikan, tidak ada yang berubah mengenai pembagian kerja sejak dahulu meskipun mereka telah menamatkan pendidikan tinggi. Hal ini diungkapkan baik oleh lulusan perempuan maupun laki-laki. Pembagian kerja didasarkan pada kekuatan fisik, keterampilan, dan kebiasaan. Kondisi ini membuktikan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pembagian peran kerja.

Pembagian kerja bukan hanya di ranah privat (rumah), tetapi juga mencakup ranah publik. Selain di lahan, pembagian kerja juga diterapkan dalam musyawarah desa yang membahas pertanian. Namun mayoritas perempuan tidak terlibat karena satu keluarga hanya diwakili satu orang, yang mana tentu saja akan diwakili oleh kepala keluarga (laki-laki).

Orang tua mengajari anak perempuan cara bertani sejak mereka masih muda, mulai dari diajak melakukan pekerjaan ringan seperti memetik kopi saat panen. Ketika mereka besar, mereka lebih banyak mengajarkan pengetahuan dan keterampilan seperti cara pemupukan, pengendalian hama dan cara tanaman. Sejak anak-anak diajari cara bertani sehingga nantinya bisa melanjutkan usaha pertanian orang tuanya. Namun ada juga lulusan yang belum diajar secara khusus oleh orang tuanya, mereka bisa bertani karena melihat langsung cara kerja orang tuanya. Jika keluarga mereka tidak memiliki kebun, orang tua mereka menyarankan untuk mencari pekerjaan selain bertani. Asalnya mereka tidak memiliki tanah sendiri, pendapatan mereka dari hasil pertanian tidak terlalu besar, sehingga mereka perlu mencari pekerjaan lain dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Laki-laki melakukan kerja keras seperti membersihkan lahan, mengolah lahan, dan menanam. Pekerjaan perempuan lebih pada memelihara tanaman dan memetik hasil panen. Kegiatan pascapanen dilakukan secara bersama-sama, seperti penggilingan atau pengeringan biji kopi. Sementara yang pergi ke luar rumah untuk melakukan pemasaran adalah laki-laki, oleh karena perempuan “dibebankan” tugas untuk menangani urusan rumah tangga atau keluarga. Sebagai perbandingan, pola seperti ini juga terjadi dalam peran perempuan di

sejumlah daerah yang menggarap sawah dari mulai penyemaian benih. Tetapi ketika masa panen sampai menjual hasil panen, lelaki yang justru berperan.

Kerja pertanian pada dasarnya dilakukan oleh keluarga inti. Namun jika personel keluarga inti tidak mencukupi, mereka memberikan kesempatan kepada keluarga lain atau tetangga dekat/keluarga besar untuk ikut membantu dengan pemberian upah. Sementara pengupahan, sebagaimana sudah dibahas di atas, ada beberapa macam modelnya dan bervariasi tingkatannya.

Jika tidak ada yang bisa membantu, barulah keluarga petani menyewa buruh tani untuk membantu menggarap lahan. Jika pekerja berasal dari tetangga/keluarga besar, ada dua pilihan yang ditawarkan: upah mereka dibayar dengan uang atau kerja balasan di kemudian hari. Tingkat upah tergantung dari jenis pekerjaan, kuantitas, dan keterampilan yang dimiliki. Namun jika pekerja berasal dari keluarga inti, maka diberikan sesuai dengan kontribusinya pada kegiatan pertanian.

Pembagian tugas dan kerja sama keluarga petani lazimnya berdasarkan kebutuhan kegiatan pada saat tanam dan panen. Dalam hal ini lebih banyak laki-laki yang mengambil peran daripada perempuan. Laki-laki berperan dalam pengolahan lahan pertanian, penanaman dan perawatan, serta pemasaran. Sedangkan perempuan mengambil peran sebagai pemanen karena lebih mudah dilakukan.

Pembagian peran antara suami dan istri dalam pertanian didasarkan pula pada musyawarah keluarga, tetapi pengambil keputusan tetaplah laki-laki (suami). Hal ini disebabkan oleh masyarakat Aceh yang menganut syariat Islam. Dalam kegiatan pertanian, laki-laki berperan dalam pekerjaan berat. Sedangkan perempuan berperan dalam pekerjaan ringan. Pola ini mengacu pada kebiasaan yang sudah menjadi budaya turun-temurun di tengah masyarakat. Sejak kecil mereka telah melihat bagaimana orang tua membagi peran dalam keluarga, sehingga hal ini juga menjadi acuan atau dasar mereka dalam membagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian. Di dalam rumah tangga, perempuan merupakan aktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dengan alasan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari peran reproduktif mereka.

Untuk urusan berkebun, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu tampak kentara. Pekerjaan berat atau kasar diselesaikan oleh laki-laki. Sementara pekerjaan “ringan” diurus perempuan dengan bantuan laki-laki pula. Pekerjaan kasar misalnya menebas tanaman-tanaman liar di kebun, mengorek lubang, dan lain-lain. Pekerjaan demikian

meminta stamina besar. Akan tetapi pembagian ini dibuat bukan karena perempuan diposisikan sebagai makhluk yang lemah atau kurang berstamina. Pembagian kerja demikian dilandasi oleh semangat kerja sama, saling menyokong, antara suami dan istri.

Kerja perempuan di ladang juga dimudahkan oleh pemakaian teknologi tertentu yang tepat guna. Lazimnya teknologi dilibatkan mulai dari persiapan tanam, menabur bibit, perawatan, hingga panen. Kerja laki-laki juga demikian. Untuk membersihkan ilalang, misalnya, tidak lagi dilakukan secara manual. Ada mesin pemotong/pembersih yang digunakan. Artinya dapat disimpulkan keterlibatan teknologi membuat pembagian peran di kebun antara laki-laki dan perempuan menjadi relatif seimbang.

Pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan petani terbelah ke dalam dua sektor. Pembagian kerja pertama sekali dimulai di tingkat keluarga. Di sini antara lain disepakati mana yang mutlak menjadi peran istri, mana yang bagian suami, dan mana yang secara relatif bisa dikerjakan bersama-sama. Tidak ada pemilahan yang absolut. Katakanlah dalam urusan mencuci pakaian atau merawat anak, istri dan suami masing-masing sepakat melakukannya sesuai dengan keadaan tertentu.

Suami tidak bertindak secara superior dalam keluarga. Hal-hal yang dilakukan merupakan hasil dari pembicaraan yang berujung pada kesepakatan internal. Kesepakatan ini kemudian bisa meluas seiring dengan bertambahnya anggota berusia dewasa di dalam keluarga. Pembagian kerja pun segera mencirikan adanya kebutuhan, kebiasaan, juga keterampilan spesifik. Hal yang terakhir itu merupakan suatu kemampuan yang hanya bisa maksimal dilakukan satu anggota keluarga dan tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Misalnya dalam urusan menebang pohon besar menggunakan alat berat, kepala keluarga (laki-laki) ditetapkan sebagai pihak yang satu-satunya memiliki kemampuan tersebut; atau paling tidak sampai nanti anak laki-laki mereka sudah mencapai usia dewasa dengan kemampuan fisik yang bisa diandalkan.

Sementara itu, dalam urusan perkebunan pembagian kerjanya dibagi dalam dua aktivitas utama: menanam dan memanen. Tetapi bukan berarti di sini dua hal tersebut dibagi secara terpisah. Maksudnya, baik dalam menanam maupun memanen laki-laki dan perempuan saling berbagi tenaga. Perempuan menggarap sebagian area, laki-laki mengolah sisa area lainnya. Jadi ini dapat dikatakan sebagai bentuk pembagian kerja yang kolaboratif dalam tiap-tiap sektor.

Lantas, muncullah pertanyaan paling penting atas praktik pembagian kerja tersebut: Apa saja kontribusi dan apresiasi para pihak dalam bentuk kerja sama yang berlangsung?

Jawaban atas pertanyaan tersebut mencakup soal perekonomian, kesenangan pribadi, kesehatan, bahwa gaya hidup. Para perempuan merasa amat senang karena apresiasi terhadap kerja keras mereka bisa menghadirkan tabungan pribadi maupun tabungan bersama. Dengan adanya tabungan, hidup menjadi terasa memiliki basis perlindungan keluarga. Pendapatan juga memberikan kesempatan untuk melakukan rekreasi dalam waktu-waktu tertentu. Bersama keluarga, suami, anak, dan anggota keluarga lainnya, perempuan bisa merasakan makan dan belanja bersama keluarga. Soal belanja, di sini termasuk juga cara memuaskan diri dengan komoditas-komoditas yang mencirikan gaya hidup terkini. Dampak ekonomi dari kerja sama adalah meningkatnya jumlah pendapatan keluarga. Dan pembangian kerja atau kerja sama dalam keluarga itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang berlaku di dalam keluarga-keluarga petani (masyarakat).

Jadi, pembagian kerja dapat dikatakan termasuk bagian dari kebudayaan masyarakat tani di Gayo. Namun tidak sangkal bahwa ada sedikit rumah tangga yang mengalami konflik sebagai akibat adanya pembagian kerja tersebut. Cek-cok biasanya terjadi karena adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pertanian (uang). Semangat kerja petani perempuan lazimnya menurun bila menghadapi persoalan ini. Menariknya, konflik ini tak akan berlarut-larut. Keluarga-keluarga petani Gayo sudah memiliki perangkat efektif guna menghadirkan konsensus bagi mereka sendiri. Musyawarah demi musyawarah pasti mengarah pada penyelesaian perkara.

Di Indonesia, tema besar pembahasan gender dalam sektor pertanian masih erat kaitannya dengan ketimpangan pembagian kerja, status kerja yang tidak jelas, beban yang terlalu berat, timpangnya partisipasi perempuan dan laki-laki secara kuantitatif dan kualitatif dalam berbagai kegiatan pembangunan pertanian, dan akses serta terhadap kontrol sumber daya. Meski keberadaan perempuan di sektor pertanian seringkali terpinggirkan akibat budaya patriarki, tetapi harus diakui bahwa potensi perempuan dalam pembangunan pertanian sangat strategis. Kontribusinya terhadap sektor pertanian telah mampu berperan serta dalam menjaga kedaulatan pangan dalam negeri.

Namun di sisi lain, seringnya absennya petani perempuan dalam program pembangunan pertanian merupakan cerminan ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Padahal pada kenyataannya hampir seluruh proses pertanian itu

sendiri dilakukan oleh kaum perempuan, mulai dari persiapan benih, penanaman dan pemeliharaan, bahkan hingga masa panen. Oleh karena itu, potensi perempuan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sangat strategis. Pekerjaan perempuan dipandang sebagai pekerjaan sekunder yang hanya “mendukung” laki-laki. Sehingga dapat menimbulkan tantangan ganda bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan pengakuan sosial atas pekerjaan yang mereka dapatkan (Martínez, 2016). Padahal, perempuan memiliki potensi yang signifikan dalam pembangunan pertanian dan peran perempuan di sektor pertanian seringkali terpinggirkan oleh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan pembagian kerja gender di bidang pertanian, perbedaan jam kerja, dan kesenjangan upah (Priminingtyas, 2013).

Risalah gender seringkali mengungkapkan cara pandang terhadap pekerjaan nyata perempuan yang berorientasi pada ibu (baca: pekerjaan rumah tangga) sehingga pekerjaan lain yang mereka lakukan hanya bersifat pelengkap atau sekunder. Tak hanya itu, rangkaian proses melahirkan mulai dari kehamilan, persalinan, menyusui, hingga mengasuh anak dianggap sebagai yang lebih penting daripada bekerja (Mosse, 1996).

Melekatnya sebagian besar urusan rumah tangga pada perempuan membuat mereka kesulitan keluar dari kancah domestik untuk menuju masuk ke kancah publik. Mengarusutamakan perempuan untuk terlibat aktif di kancah publik melalui berbagai sarana merupakan keniscayaan. Dalam konteks pertanian, kehadiran teknologi memang memudahkan proses produksi. Tetapi teknologi yang diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem kerja pun semata condong untuk untuk menunjang produktivitas laki-laki. Demikian pula rancangan sistem kerja yang relatif tidak mendukung kegiatan ekonomi tradisional perempuan dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sektor domestik. Akibatnya, perempuan mencari penyesuaian untuk masuk ke sektor publik dengan berpartisipasi sebagai pekerja industri. Dan di sektor publik itu pun mereka harus mengalami kondisi kerja yang buruk, dianggap memiliki produktivitas yang rendah, sehingga hanya mendapatkan upah yang rendah (Esterik, 1996; Putranti, 2004).

Di kalangan keluarga petani Gayo pembagian peran antara suami dan istri di bidang pertanian didasarkan pada musyawarah keluarga, tetapi pengambil keputusan untuk kegiatan pertanian tetap laki-laki (suami). Dapat disimpulkan bahwa isu gender di bidang pertanian berkaitan erat dengan pembagian kerja yang tidak seimbang, beban kerja yang terlalu berat bagi perempuan dengan status pekerjaan yang tidak jelas, partisipasi kuantitatif atau kualitatif

yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai kegiatan pembangunan pertanian, akses dan kontrol sumber daya manusia, dan sumber daya pembangunan dan manfaat pembangunan (Hutajulu, 2015).

Untuk mendukung pengorganisasian diri perempuan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kontribusi mereka di bidang pertanian, partisipasi berbasis masyarakat dan pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pendorong yang kuat untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan sosial (Devendra, 2013). Senada dengan Devendra, Safrida et.al (2013) dalam penelitiannya tentang strategi penguatan perempuan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar menyebutkan bahwa strategi penguatan perempuan meliputi: (1) peningkatan pendidikan melalui pelatihan, termasuk isu gender; (2) reformasi kelembagaan lokal yang mengesampingkan peran perempuan; dan (3) mengadvokasi laki-laki untuk memberikan hak bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan rumah tangga, ekonomi, dan publik.

Perempuan juga berkontribusi pada proses yang tidak setara dalam hal akses dan kontrol sumber daya dan pengambilan keputusan, sehingga secara langsung memengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat (Dilanthi Koralagama et al., 2017). Peran dan kapasitas pengambilan keputusan perempuan dalam kegiatan pertanian bervariasi antarrumah tangga, lokasi, dan budaya/etnis. Anggota keluarga laki-laki dan perempuan juga menghadapi akses yang tidak setara terhadap sumber dan pengetahuan. Akibatnya mereka membuat pilihan tentang adopsi teknologi secara berbeda (Gebre et al., 2019). Gender masih jarang dibahas dalam penyuluhan pertanian dan adopsi teknologi (Lambrecht et al. 2016). Gender harus menjadi perhatian tertinggi ketika mempertimbangkan konteks pembangunan berkelanjutan (Diaz dan Najjar, 2019).

Menurut Khalisuddin dkk (2012), pembagian kerja laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat Gayo cuma berlangsung dari pagi sampai siang hari saja. Namun skema ini hanya dalam pertanian sawah. Dalam bidang perkebunan lain lagi konfigurasinya. Dalam menggarap kebun kopi tidak banyak terjadi pembagian kerja karena relatif dilakukan secara bersama-sama.

Upah laki-laki yang diperoleh laki-laki dari perkebunan dan pekerjaan utama lain barangkali sudah mencukupi untuk keperluan pemenuhan pangan keluarga. Akan tetapi ketika kita berbicara ketahanan pangan, kita juga berbicara soal kerawanan pangan. Uang dan

makanan yang mencukupi belumlah menjamin keselamatan keluarga dari kerawanan pangan. Setiap keluarga mesti memiliki simpanan yang memadai pula, baik dalam bentuk uang maupun skema pemasaran komoditas alternatif. Dalam hal terjadinya kerawanan atau krisis pangan, upah petani perempuan (istri/ibu) yang mempertebal keuangan keluarga dapat menjadi penyokong ketahanan pangan keluarga. Petani perempuan Gayo selalu menyediakan sumber daya lapir kedua. Artinya, perempuan bukan hanya pencari nafkah kedua, tetapi ia juga menjadi benteng utama ketahanan pangan bagi keluarganya.

Namun di balik peran besar tersebut, para petani perempuan Gayo juga menghadapi persoalan khas yang tak dapat mereka selesaikan seorang diri maupun internal keluarganya. Dari sinilah kemudian mereka membangun jejaring dan membentuk koperasi yang dalam perkembangannya memiliki peran signifikan dalam mendorong kekuatan pertahanan pangan keluarga dan masyarakat.

Bagian 3

Peran Koperasi dalam Penyejahteraan Petani Perempuan

Dewi adalah seorang petani perempuan Gayo. Ia memiliki kebun kopi dan anak yang masih kecil. Bagi Dewi, kebun dan anak adalah hidupnya. Dengan adanya kebun ia bisa menjamin pangan untuk anaknya. Dan ketika sang anak besar nanti, dia bisa membantu Dewi di kebun; lalu mungkin akan meneruskan usaha perkebunan keluarga.

Tetapi Dewi tak bisa membelah diri. Ketika pagi tiba, ia punya dua kewajiban: menggarap lahan dan menjaga anak. Sehari-hari menjaga anak di rumah berarti tak pergi ke kebun. Tidak berkebun berarti tidak memperoleh pendapatan harian dan lahan tidak tergarap. Sebaliknya, berangkat ke kebun secara pasti akan membuat anaknya terlantar.

Situasi ini bukan cuma dihadapi oleh Dewi. Masih banyak Dewi lainnya di Tanah Gayo yang menjalani multiperan. Ada beberapa perempuan lainnya yang kewalahan atau dilema antara mengurus anak atau pergi ke kebun untuk membantu suami mengolah lahan. Karena masalah ini bukan cuma terjadi pada satu orang, berarti ia suatu fenomena sosial di kalangan petani perempuan Gayo. Mereka lantas berembuk, mencari cara, dan berhasil menemukan kiat memecahkan persoalan pelik yang dihadapi tersebut.

Adalah koperasi yang kemudian dimanfaatkan. Koperasi, utamanya yang khusus beranggotakan perempuan, lantas diarahkan untuk menciptakan sebuah fasilitas yang sesuai kebutuhan. Dengan dana yang ada, koperasi kemudian membangun tempat penitipan anak. “Saya bisa menitipkan anak di PAUD yang dibangun koperasi saat bekerja di kebun,” kata Rukayah.

Koperasi membangun tiga PAUD di tiga desa. Jumlah ini amat memadai untuk menampung anak-anak petani yang jumlahnya tak sedikit.

“Koperasi bisa membantu tiga desa dengan mendirikan tiga PAUD untuk petani wanita yang tergabung dalam keanggotaan koperasi. Ini agar mereka bisa menitipkan anak jika ingin ke kebun. Anak tidak harus menunggu orang tua di kebun sehingga digigit nyamuk, serangga, atau terluka. Anak juga bisa mendapat pendidikan di PAUD” (Hasil wawancara dengan Dewi, petani perempuan).

Dalam konteks koperasi ini, ada tiga kelompok perempuan yang diwawancarai:

- Perempuan anggota koperasi khusus perempuan.
- Perempuan anggota koperasi campuran.
- Perempuan yang tidak menjadi anggota koperasi.

Seluruh wawancara itu dilakukan pada 21 Juni 2021. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran bagaimana koperasi turun menyokong secara efektif perjuangan perempuan di Gayo dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi keluarga dan masyarakatnya. Namun topik koperasi ini tidak cuma berisi hal-hal indah. Di dalamnya juga bisa ditemukan persoalan-persoalan kepemimpinan atau bagaimana peraturan koperasi yang secara tak langsung menghambat perempuan.

Seperti permasalahan di banyak daerah di Indonesia, pengelolaan koperasi yang belum transparan dan profesional sering mendatangkan masalah. Perempuan yang banyak menjadi anggota koperasi tak luput menjadi korban.

Isu Kepemimpinan dalam Koperasi

Gayo adalah produsen kopi Arabika terbesar di Indonesia. Dataran tinggi ini memproduksi 26 persen dari produksi kopi Arabika Indonesia pada 2015. Dua daerah di Aceh yang memberi sumbangsih besar atas pasokan Arabika itu adalah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Produksi kopi merupakan sumber pendapatan utama bagi sekitar 77.000 petani kecil di kedua daerah tersebut (The Canada–Indonesia Trade and Private-Sector Assistance, 2018). Beberapa sumber mengklaim bahwa lebih dari 60 persen penduduk mengandalkan kopi sebagai sumber pendapatan utama mereka. Produktivitas kopi di daerah ini telah mencapai hampir 700 hingga 800 kg per hektar. Potensinya amat besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejak 1992, petani kopi Gayo telah melakukan beberapa program sertifikasi produk yang dibangun di atas prinsip pertanian berkelanjutan, untuk meningkatkan nilai jual kopi Arabika Gayo di pasar dunia. Program-program tersebut meliputi: *Organic Certified*, *Fairtrade*, dan *Rainforest*. Ketiganya merupakan standar yang mengutamakan kelestarian lingkungan, perdagangan yang adil, serta penggunaan pupuk organik yang lebih ramah bagi kesehatan.

Namun ironisnya, meski harga kopi naik, keuntungan belum juga mengalir ke petani akibat pasar kopi di tingkat eksportir belum terintegrasi dengan pasar kopi di tingkat petani.

Keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, dan akses informasi pasar menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani kopi karena tidak mampu mengendalikan perkembangan harga secara berkelanjutan (Mega Amelia Putri et al., 2013).

Tahun 2016, terdapat 212.135 koperasi di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 37.783.160 (Azhari, Syechalad, Hasan, dan Majid 2017). Di daerah Gayo, koperasi telah beroperasi dari 3 hingga 16 tahun. Hal ini menunjukkan kelangsungan hidup dan kesuksesan mereka. Pada 2019, sebanyak 31 koperasi pertanian di Aceh Tengah melayani produsen kopi di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2021). Di antaranya ada beberapa koperasi yang terkenal, yakni:

- Koperasi Arisarina
- Koperasi Baburrayan
- Koperasi Gayo Mandiri
- PT Gayo Megah Raya
- Koperasi Reje Item Gayo
- Koperasi Wanita Ketiara (koperasi khusus perempuan).
- Koperasi Kopi Wanita Gayo (koperasi khusus perempuan)

Koperasi-koperasi itu memang memainkan peran strategis dalam mencapai pembangunan ekonomi pertanian berkelanjutan di Gayo. Sejarah koperasi telah menunjukkan bagaimana anggotanya cenderung mengarah pada keberhasilan. Menurut Hakelius (1996) dan Bhuyan (2007), partisipasi aktif dan loyalitas anggota koperasi merupakan bagian integral dari keberhasilan mereka.

Di banyak negara, koperasi adalah organisasi utama bagi petani yang menyediakan pasokan dan pemasaran sebagai fungsi utama (Adeyemo, 2004; Ghebremichael, 2013; Holloway et al., 2000; Piesse et al., 2005). Keberadaan koperasi justru “memperpendek rantai pasokan dengan memungkinkan produsen untuk mengintegrasikan sebagian besar atau semua proses pengolahan dan pemasaran ke dalam satu atau beberapa langkah”. Konfigurasi demikian bisa menciptakan “penghematan substansial pada transaksi dan biaya perantara lainnya” (Tortia, Valentinov dan Iliopoulos, 2013: 24) .

Koperasi pertanian mempermudah peminjaman bagi petani: menurunkan suku bunga melalui pembukaan fasilitas skema kredit bersama, yang pada gilirannya membuat peminjaman menjadi lebih mudah (Syden dan Lee, 2016). Meskipun koperasi telah memasarkan hasil panen petani secara lebih efisien, manfaat paling signifikan yang dinikmati petani adalah keuntungan yang mereka peroleh (Barton, 2000). Secara umum, manfaat sosial

dan peningkatan kualitas hidup petani yang dihasilkan dari keanggotaan dalam koperasi ini bersifat menyokong (Ferguson dan Kepe, 2011).

Ada banyak dokumentasi yang menunjukkan pemberdayaan perempuan melalui koperasi; yang pada gilirannya memiliki efek limpahan positif bagi keluarga mereka. Salah satu koperasi tersebut adalah Lijjat, sebuah usaha kewirausahaan sosial yang unik di India (Datta dan Gailey, 2012). Didirikan tanpa dukungan pemerintah sehingga memiliki dana terbatas, para anggotanya bisa dididik hingga menjadi perempuan-perempuan yang berdaya secara pengetahuan dan ekonomi. Para perempuan yang bergabung mulanya tidak terampil dan berasal dari latar belakang kelas menengah ke bawah. Mereka lalu bersedia bekerja penuh dedikasi. Hal ini mendorong perilaku kewirausahaan serta membantu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Koperasi juga memudahkan kehidupan mereka dengan menyediakan transportasi harian dari rumah dengan bus, pemeriksaan kesehatan, beasiswa untuk anak-anak, kampanye literasi, pelatihan komputer untuk anak-anak mereka, dan skema simpan pinjam. Meskipun diorganisir sebagai koperasi nirlaba dengan struktur organisasi non-hierarki, model bisnis koperasi tersebut memungkinkan pemerolehan akses atas pendapatan yang lebih besar melalui pembagian keuntungan.

Majurin (2012) mengungkapkan bahwa koperasi di Kenya, Tanzania, dan Uganda juga efektif dalam menangani berbagai masalah kesetaraan gender seperti pekerjaan yang tidak dibayar, tanggung jawab bersama, dan kekerasan berbasis gender. Semua itu ditekan melalui peningkatan harga diri perempuan dan kemandirian finansial mereka. Pola yang sama juga ditemukan di Indonesia. Perempuan menerima peningkatan keterampilan yang berkaitan dengan konsultasi bisnis, metode organisasi, manajemen, administrasi/akuntansi bisnis, peningkatan kualitas produk, akses ke sumber daya produktif, informasi pasar, peluang bisnis.

Para perempuan juga memperoleh banyak manfaat dari koperasi, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka, selain kemampuan mengelola organisasi. Baik itu di tempat kerja maupun dalam keluarga serta lingkungan sosial, hukum, dan politik (Marasabessy, Abdulmudy dan Umanailo, 2020).

Di Kolombia, terlepas dari tuntutan yang ditempatkan pada peran pengasuhan perempuan dan posisi subordinat mereka dalam produksi kopi, ditemukan bahwa sebagian besar petani perempuan diberdayakan dalam program renovasi dan sertifikasi kopi yang didanai negara (Pineda, Piniero dan Ramirez, 2019).

Di Ethiopia di mana jumlah koperasi terus bertambah, lembaga ini telah memungkinkan perempuan petani untuk mengakses sumber keuangan, meningkatkan daya tawar mereka, dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas khusus (Ghebremichael, 2013). Menyadari pekerjaan perempuan dalam pembangunan negara, pemerintah Ethiopia telah mendorong pembentukan koperasi untuk perempuan (Tsfay dan Tadele, 2013). Dengan demikian koperasi pun mengurangi persoalan kesulitan mata pencaharian dan membuka jalan menuju pemulihan. Baik melalui cara yang sehat secara sosial dan ekonomi dan berkelanjutan. Para petani perempuan kini memiliki lingkungan yang aman di mana mereka bisa hidup dengan penuh kepercayaan diri. Koperasi adalah saluran; perempuan telah menjadi agen perubahan yang aktif, pengusaha, dan promotor transformasi sosial untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri, kehidupan keluarga mereka, dan kehidupan komunitas mereka.

Ferguson dan Kepe (2011) menunjukkan bahwa perempuan anggota koperasi pertanian Uganda telah meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan bernegosiasi mereka. Program transfer keterampilan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam usaha pertanian. Perempuan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan keputusan rumah tangga tertentu ketika berhadapan dengan laki-laki. Ini adalah hasil dari penerimaan pendapatan yang lebih tinggi secara mandiri.

Namun hambatan tetap ada karena peran perempuan di bidang pertanian belum sepenuhnya mendapat pengakuan masyarakat. Koperasi pertanian sangat bermanfaat bagi perempuan karena mereka memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya, program, dan kesempatan kerja (Oberhauser dan Pratt, 2004). Melalui koperasi, perempuan dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang relevan untuk memulai bisnis, yang menghasilkan kemandirian dan status yang lebih besar bagi mereka. Els Lecoutere (2017) menggemakan temuan seperti itu. Sama seperti yang lainnya, ia menyimpulkan bahwa koperasi pertanian memiliki dampak positif pada kesejahteraan ekonomi, pengetahuan, dan adopsi praktik agronomi, terutama di kalangan perempuan.

Bukti di seluruh dunia menunjukkan bagaimana koperasi telah memberikan manfaat yang tidak sedikit, khususnya bagi perempuan petani kopi. Sedikit yang diketahui tentang peran koperasi dalam kehidupan perempuan produsen kopi di Aceh, maka penelitian ini dilakukan. Berdasarkan narasi dari 18 perempuan petani kopi, penelitian ini mengeksplorasi apakah perempuan petani kopi di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah telah memperoleh manfaat yang memadai.

Di seluruh Indonesia, koperasi bertindak sebagai tulang punggung infrastruktur pertanian negara. Petani kopi telah mengandalkan koperasi untuk manfaat sosial dan ekonominya. Pemilik koperasi (pemasok kopi, pekerja, atau pelanggan) menerima keuntungan dari koperasi (Molk, 2014). Koperasi telah membantu meningkatkan tingkat produksi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi. Secara khusus, koperasi pertanian yang berfokus pada usaha kecil menengah (UKM) telah memberdayakan anggota melalui bantuan keuangan dan pemasaran, koordinasi antaranggota, kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha (Baga, 2013; Henley dan Boomgaard, 2009; Henley, 2007; Sudaryanto dan Wijayanti, 2013). Apalagi koperasi telah memperkuat posisi tawar petani, membuka akses pasar baru dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi (Agustia et al., 2017).

Koperasi memiliki dua tujuan. Pertama, sebagai badan usaha. Di sini koperasi hendak mengumpulkan keuntungan dari anggota-anggotanya. Kedua, sebagai lembaga sosial. Di sini, koperasi hendak memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk memaksimalkan pendapatan anggotanya. Dengan keberadaan petani, keuntungan bisa diperoleh lebih besar. Hasil panen yang dibeli koperasi dari anggotanya kemudian mendatangkan keuntungan. Lalu keuntungan itu dipakai untuk memberdayakan petani yang menjadi anggota koperasi.

Masing-masing koperasi memiliki kapasitas jual dan beli kopi yang berbeda-beda, bergantung pada wilayah sasaran koperasi dan jumlah kontrak. Koperasi bertujuan untuk menaikkan harga kopi dan mempromosikan penjualan yang lebih besar untuk mencapai keuntungan yang diperlukan demi menjaga kelangsungan usaha koperasi (Azhari, Syechalad, Hasan, dan Majid, 2017). Selain itu, koperasi memperoleh *fee premium* dari penjualan kopi dengan sertifikasi *fairtrade* kepada pembeli di luar negeri; *fee* yang meningkat seiring dengan peningkatan penjualan bisa mendanai perbaikan bisnis bagi petani anggota.

Kebanyakan petani di Gayo bergabung dalam “koperasi campuran”. Koperasi ini merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Koperasi campuran merupakan institusi ekonomi-sosial yang paling eksis di kalangan petani Gayo, termasuk para perempuan. Sebagian besar petani bergabung di dalam koperasi jenis ini. Di dalamnya, baik petani laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat setara. Tidak ada ketentuan bahwa laki-laki, sebagai pihak yang namanya tertera pada surat kepemilikan lahan, harus memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Koperasi ini cukup prospektif bagi siapa saja, sehingga dalam banyak kasus keanggotaannya “diwariskan” dari orang tua ke anak. Ketika anak mereka sudah dianggap cukup layak mengelola lahan sendiri, para orang tua mengajak anak-anaknya menjadi anggota koperasi pula. Kaderisasi petani berhubungan erat dengan kaderisasi anggota koperasi. Petani-petani tua membawa anaknya ke dalam koperasi sebagai upaya melindungi anaknya sebagai petani baru. Perlindungan ini utamanya bertalian dengan kesejahteraan keluarga dan daya tahan aset (tanaman kopi di kebun).

Dalam koperasi campuran, sudah tentu peran laki-laki mendominasi. Dalam pengambilan-pengambilan keputusan, pengaruh laki-laki lebih menonjol ketimbang perempuan. Koperasi malah tidak begitu menaruh perhatian pada penyelesaian masalah-masalah yang spesifik perempuan. Rukayah, seorang petani perempuan, mengeluhkan susah-susah mengemukakan pendapat dalam rapat-rapat “koperasi campuran” karena dominasi laki-laki. Perempuan segan berbicara di koperasi kategori ini oleh karena jumlah laki-laki lebih banyak dan dominan pengaruhnya. Akan tetapi, sejak bergabung dengan koperasi khusus perempuan pada 2014, ia telah memperoleh sejumlah manfaat dalam koperasi perempuan. Di sini ia merasa dapat mengutarakan pandangannya secara bebas namun relevan.

Dominasi ini muncul karena dua hal. Pertama, laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam koperasi kopi. Kedua, mayoritas posisi kepemimpinan di koperasi dipegang oleh laki-laki. Kuatnya budaya patriarki telah membentuk hak istimewa laki-laki di kalangan petani kopi di Gayo. Dominasi ini tentu saja membawa laki-laki pada penuaian keuntungan yang lebih tinggi. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di koperasi kopi, mereka cenderung menghindari dari peluang tersebut dan membiarkan laki-laki mengambil posisi tersebut. Mereka masih dipandang sebagai pembantu keluarga daripada pekerja yang cakap.

Meskipun berkeinginan untuk bergabung dengan koperasi karena melihat manfaat yang banyak, tidak semua perempuan petani kopi memiliki hak istimewa untuk menjadi anggota koperasi. Di Gayo, petani kopi laki-laki dan perempuan memiliki akses yang tidak setara terhadap keanggotaan koperasi. Seperti di daerah lain di Indonesia, keanggotaan koperasi hanya terbuka untuk petani yang memiliki tanah, suatu persyaratan yang secara otomatis mendiskualifikasi banyak petani perempuan. Kepemilikan tanah yang sah atas nama kepala rumah tangga, posisi yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki.

Karena keanggotaan koperasi hanya terbuka bagi petani pemilik lahan, meskipun laki-laki dan perempuan mungkin sama-sama mengelola kebun kopi, persyaratan ini secara otomatis menutup pintu bagi perempuan petani. Jadi, laki-laki membentuk anggota mayoritas, sedangkan keterwakilan perempuan sangat rendah. Hal ini terjadi di daerah Gayo. Jika perempuan menjadi anggota koperasi, mereka akan berhasil bernegosiasi dengan suaminya untuk mengizinkan bergabung dengan mendapatkan pernyataan bahwa sebagian dari tanah keluarga adalah miliknya sebagai istri. Sementara perempuan pemilik lahan yang bisa menjadi anggota biasanya adalah janda yang memiliki tanah baik itu dari hasil membeli maupun warisan keluarga.

Dalam rapat-rapat petani, perempuan jarang terlibat karena ada “ketentuan” satu keluarga petani diwakili oleh satu orang dari keluarga tersebut. Dan tentu saja yang bakal datang adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak berlaku bagi para perempuan yang bersuamikan kepala desa atau anggota kelompok tani.

Atas hambatan-hambatan itu, perempuan yang ingin memiliki koperasi yang bisa menjawab kebutuhan khas perempuan lantas membentuk koperasinya sendiri. Seorang petani perempuan yang masih muda mengungkapkannya:

“Ada koperasi khusus perempuan, yang tidak mensyaratkan tanah atas nama perempuan. Tetapi harus ada surat pemberitahuan dari suami bahwa tanah itu dikelola oleh istrinya. Setiap petani membagi lahannya ke dalam beberapa bidang tanah yang kecil, sehingga setiap bidang dapat didaftarkan pada koperasi berbeda. Jadi ada suami istri yang mempunyai beberapa bidang dan setiap bidang dapat didaftarkan pada koperasi yang sama atau berbeda sesuai keinginan mereka (Hasil wawancara dengan Riana, 39 tahun).

Koperasi Khusus Perempuan sebagai Keniscayaan

Pertanyaan mendasar yang patut diajukan dalam mempelajari pemberdayaan yang dilakukan koperasi khusus perempuan antara lain: mengapa perempuan harus membentuk koperasinya sendiri? Apa perbedaan “koperasi campuran” dengan koperasi khusus perempuan? Apa saja keuntungan yang bisa diperoleh dari koperasi khusus perempuan yang tidak bisa didapatkan di koperasi campuran?

Di Sumatra Utara, 80 persen petani kopi terdiri dari perempuan dan dengan demikian memainkan peran penting dalam produksi kopi (Kerjasama Keuangan Internasional, 2014). Sebagian besar produksi kopi cenderung berbasis keluarga dan dilakukan di lahan pertanian kecil dengan luas lahan kurang dari satu hektare. Kopi masih dipetik dengan tangan, lalu digiling dan dikeringkan. Adalah perempuan yang melakukan sebagian besar tugas ini.

Namun tak seperti laki-laki, mayoritas perempuan dianggap sebagai pekerja keluarga daripada produsen kopi dalam hak mereka sendiri. Karena statusnya yang marjinal, mayoritas perempuan petani kopi tidak menjadi anggota koperasi melainkan menyerahkan peran ini kepada suami. Tutin, seorang petani kopi berusia 34 tahun, menjelaskan bahwa dia tidak perlu bergabung dengan koperasi kopi karena suaminya sudah menjadi anggota. Dia juga mengatakan bahwa tidak keberatan dengan pengaturan ini. Tutin berpendapat bahwa suami-istri tidak perlu bergabung dalam koperasi karena cukup satu orang yang bergabung. Sikap ini tentu saja bukan sikap kebanyakan perempuan di Gayo.

Faktanya semakin banyak perempuan petani Gayo yang bergabung dalam koperasi. Di antara perempuan yang diwawancarai dalam penelitian ini, termasuk mereka yang suaminya sudah menjadi anggota. Keduanya memperoleh manfaat setelah menjadi anggota koperasi. Berikut beberapa testimoni perempuan yang kami wawancarai mengenai manfaat yang mereka peroleh dari keberadaan koperasi:

“Koperasi telah meningkatkan kemampuan saya dalam teknik bertani yang lebih baik, penggunaan teknologi, dan mesin untuk memudahkan pekerjaan saya di pertanian. Saya juga memperoleh dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar kopi lokal dan internasional. (Melalui koperasi saya juga belajar tentang) proses sertifikasi dan manfaat yang diperoleh dari sertifikasi. Kemampuan (saya) meningkat, seperti dalam hal berurusan dengan pembeli, keterampilan komunikasi, dan strategi pemasaran. Saya juga meningkatkan kepercayaan diri.” (Hasil wawancara dengan Ajeng, 44 tahun, yang memuji koperasi karena membantu memperluas pengetahuannya tentang produksi kopi).

“Saya bergabung dengan koperasi karena ada pelatihan tentang pemangkasan dan pemanenan kopi.” (Hasil wawancara dengan Noraisiah, 36 tahun, yang merasakan manfaat nyata dari program pelatihan peningkatan keterampilan binaan koperasi).

“Koperasi yang saya ikuti mengadakan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan produksi kopi seperti pelatihan pengelolaan sampah di kebun, sosialisasi larangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, serta pelatihan pemangkasan dan pemanenan kopi yang baik. Juga ada pelatihan *cupping* kopi.” (Hasil wawancara dengan Indah, 29 tahun).

Namun perempuan tidak selalu bisa bergabung dengan koperasi karena bermacam penyebab. Seperti yang diungkapkan Dewi (39 tahun), bahwa ia tidak bisa bergabung karena lahannya tidak memenuhi persyaratan luas. Di samping itu, Dewi juga memakai pupuk kimia. Sementara koperasi mensyaratkannya anggotanya mesti memakai pupuk organik.

Di sisi lain, ada juga perempuan yang merasa tak perlu bergabung ke koperasi karena alasan “kepraktisan” bisnis. Hal ini seperti disampaikan oleh seorang petani perempuan bernama Chandra (42 tahun):

“Ikut atau tidak itu soal pilihan. Saya lebih suka menjual kopi langsung ke konsumen atau kafe. Bukan koperasi. Saya juga mengolah biji kopi sendiri ketimbang membawanya ke koperasi.”

Namun demikian, peran koperasi telah menjadi bagian integral dalam pemberdayaan perempuan. Ditemukan bahwa kebanyakan petani perempuan sangat ingin menjadi anggota koperasi agar dapat menjual kopi mereka dengan harga memadai serta memperoleh keuntungan dari “Premi Fairtrade”.

Sebagai anggota koperasi, mereka ingin meraih dana premi Fairtrade, terutama untuk pengasuhan anak, pendidikan anak usia dini, dan kesehatan reproduksi. Anggota koperasi perempuan juga ingin memiliki “ruang sendiri” di mana mereka dapat berbagi cerita dan pengalaman menjadi petani kopi, termasuk kehidupannya sebagai istri dan ibu. Koperasi khusus perempuan juga dapat menghadirkan dukungan mental bagi sesama. Alhasil perempuan pun menjadi kuat melalui peningkatan kepercayaan diri untuk membuat pilihan yang tepat dan diberi kesempatan dalam memperluas kendali mereka atas sumber daya. Selain itu, perempuan melihat keanggotaan mereka dalam koperasi dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kontrol atas setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Berikut ini koperasi-koperasi di daerah Gayo yang dipimpin perempuan:

- Kokowagayo
- Arinagata
- Ara Cahayani Gayo
- Utamagro
- Ratu Ketiarra
- Koperasi Ketiarra
- A3 (belum bersertifikat Fairtrade)

Intan (41 tahun), menjadi anggota koperasi khusus perempuan sejak 2014. Ia tertarik bergabung ke koperasi karena diajak seorang teman. Baginya, manfaat bergabung dengan koperasi lebih dari sekadar pengetahuan teknis yang akan diperolehnya dalam meningkatkan tingkat produksi kopi. Dia malah tertarik pada bantuan nyata yang akan diterima seperti gelas (peralatan dapur) selimut, kebutuhan pokok, dan atap seng untuk rumah kebun. Tentunya selain pendapatan dari menjual kopi. Tetapi sebelum bergabung dengan koperasi, dia, seperti semua wanita lain yang ingin bergabung dengan koperasi kopi ini, harus memperoleh izin dari suaminya. “Saya harus meminta izin kepada suami untuk bergabung dengan koperasi

karena itu adalah persyaratan wajib,” kata Indah. Perempuan itu memegang posisi bendahara di koperasi dan suaminya sangat mendukung peran yang dia ambil.

Data Juni 2018 tentang kepemimpinan perempuan dalam koperasi Fairtrade di Gayo menunjukkan bahwa hanya 18 persen perempuan yang menjadi ketua pengurus koperasi; 29 persen berperan sebagai sekretaris; dan 56 persen menjadi bendahara. Sebenarnya Forum Perempuan Kopi Gayo didirikan karena itu: sebagai wadah advokasi dan narasumber kepemimpinan perempuan di koperasi dengan menjadi wadah diskusi dan pelatihan untuk membantu perempuan petani mengembangkan potensinya, meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai aspek pertanian kopi, mendorong kemandirian ekonomi, dan memungkinkan mereka untuk terus belajar tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam koperasi.

Upaya serupa lainnya untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam koperasi kopi terjadi pada awal 2018. Canada–Indonesia Trade and Private-Sector Assistance (TPSA) bermitra dengan Jaringan Fairtrade of Asia-Pacific Producers (NAPP) mempromosikan kepemimpinan perempuan di koperasi kopi Gayo dan membantu membangun tata kelola yang lebih responsif gender dan seimbang. Kerja sama ini menarik 21 staf perempuan dan delegasi dari koperasi yang dipimpin perempuan untuk menghadiri Training of Trainers (ToT) selama lima hari.

Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa jika perempuan mengambil posisi kepemimpinan, seringkali mereka cenderung melakukannya di koperasi perempuan. Kepemimpinan memungkinkan penghasilan tambahan. Namun terdapat pula perempuan yang menghindari jabatan pengurus di koperasi. Para perempuan sebenarnya enggan memiliki jabatan tinggi di dalam koperasi mereka. Hal ini karena situasi yang membuat kewalahan. Tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga dan di luar sebagai petani kopi sudah cukup membuat hari mereka padat. Hanya tersedia sedikit waktu untuk aktivitas lainnya.

“Menurut saya wanita boleh diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan penting di koperasi, tapi saya pribadi lebih memilih mengurus keluarga dan anak jadi belum punya banyak waktu untuk menjadi pengurus koperasi.” (Hasil wawancara dengan Ridha Hidayah).

“Saya sulit karena harus mengurus banyak anak, kebun, dan pekerjaan rumah ... Waktu yang sedikit membuat wanita kesulitan menjadi pengurus koperasi.” (Hasil wawancara dengan Setiawati).

“Ya, kalau punya waktu (saya bersedia menjadi pengurus koperasi). Bagi saya, itu sulit karena saya harus mengurus anak, kebun, dan pekerjaan rumah.” (Hasil wawancara dengan Riana, 31 tahun).

“(Saya mengalami) keterbatasan waktu karena harus mengurus anak dan mengurus rumah ... (Ini) menjadi faktor penghambat untuk menjadi pengurus.” (Hasil wawancara dengan Noraisiah, 36 tahun).

“Adanya keterbatasan waktu memang nyata karena kita harus mengasuh anak ... Ini menjadi faktor penghambat untuk menjadi pengurus. Namun tidak menghalangi kita untuk menjadi anggota koperasi.” (Hasil wawancara dengan Nurul, 35 tahun).

Di Aceh di mana hukum Islam berlaku dalam beberapa aspek kehidupan, ada asumsi bahwa agama menjadi penghalang bagi partisipasi aktif perempuan di ruang publik, termasuk koperasi. Namun hal ini tidak terdapat dalam kasus keterlibatan petani perempuan Gayo. Mereka tidak melihat agama sebagai penghalang, baik dalam aktivitas di kebun, organisasi tani, maupun koperasi. Agama bukanlah faktor pembatas di sini karena perempuan bebas menjadi anggota koperasi perempuan walaupun harus memperoleh mendapat izin dari suaminya.

Anggota koperasi perempuan yang tidak memiliki tanah atas namanya sendiri dapat meminta izin suaminya untuk menggunakan tanah tersebut sebagai syarat masuk koperasi. Saat menjual kopi dalam bentuk buah ceri ke pengepul di desa, uang hasil penjualan diterima langsung oleh perempuan sebagai anggota koperasi. Menurut Riana, seorang petani perempuan, keputusan atas tanah dan penggunaan uang dari penjualan kopi dapat ditentukan sendiri oleh istri/perempuan.

“Agama bukan faktor pembatas. Tapi budaya di sini adalah laki-laki menjadi kepala rumah tangga dan lebih aktif dalam kegiatan sosial di tingkat desa seperti menghadiri rapat desa dan terlibat dalam arisan desa.” (Hasil wawancara dengan Marlina, 38 tahun).

Meskipun tidak ada peraturan tertulis dalam Islam untuk menghalangi perempuan terlibat dalam ruang publik, laki-laki memiliki keuntungan lebih dalam koperasi kopi karena berperan sebagai “pencari nafkah”. Oleh karena itu sampai batas tertentu Islam memberikan laki-laki, bukan perempuan, legitimasi moral untuk berpartisipasi dalam organisasi di ruang publik.

Perempuan, Kopi, dan Koperasi

Dengan adanya koperasi, penjualan kopi lebih pasti. Hasil panen yang dijual ke koperasi mendatangkan keuntungan lebih ketimbang dijual kepada pengumpul individual. Koperasi menjamin akses pasar kepada petani. Koperasi juga memberikan banyak bantuan

ekonomi. Di samping itu, ada pula pelatihan-pelatihan peningkatan pengetahuan serta kecakapan teknis para anggotanya demi memperoleh hasil panen yang lebih baik, yang mana situasi ini berimplikasi pada naiknya nilai yang diperoleh dari hasil panen tersebut. Sebelumnya, petani mengolah kebun mereka sesuai ilmu turun-temurun dari kakek-nenek mereka.

“Sejak bergabung baru paham makna kopi organik karena ada pelatihan dan bimbingan oleh koperasi. Jadi tahu kalau organik tidak boleh diberi pupuk kimia dan pestisida kimia” (Hasil wawancara dengan Desi, 26 tahun).

Penggunaan pestisida kimia sebenarnya dilakukan oleh para petani, tetapi yang menanam benih nonorganik. Tindakan seperti ini tentu tak bisa dilarang, karena hal tersebut merupakan salah satu teknik dalam bertani kopi. Setiap petani boleh memakai teknik apa pun yang dirasa lebih tepat. Dalam persoalan ini, koperasi juga turun tangan menghadirkan manfaat. Koperasi membuat parit pembatas antara kebun yang menggunakan pestisida kimia dengan pestisida organik. Dengan adanya parit tersebut, pestisida kimia di kebun yang satu tidak mencemati kebun di sebelahnya.

Koperasi menggelar pelatihan-pelatihan karena mereka berkepentingan untuk memperoleh kopi yang bermutu dari para petani. Tidak berhenti di situ, kopi yang bermutu juga diharapkan bisa dihasilkan dalam jumlah yang memadai, atau boleh dikatakan banyak. Kualitas-kuantitas ini tak mungkin dicapai tanpa pengetahuan teknis terkini. Oleh karena itulah edukasi mesti diberikan kepada petani. Koperasi menggelar pembinaan, yang mana dari hal tersebut mereka bisa meraih keuntungan berupa menjual kopi yang bermutu-berjumlah tinggi ke pasar.

Salah satu manfaat yang dinanti-nanti anggota koperasi adalah bantuan dari premi tahunan. Premi ini diberikan kepada petani berdasarkan jumlah produksi. Sementara itu petani yang menjadi pengurus koperasi bakal memperoleh gaji bulanan. Pengurus koperasi perempuan bukan cuma laki-laki. Terdapat pula beberapa perempuan. Hanya saja kebanyakan perempuan enggan menduduki jabatan pengurus oleh karena kesibukan mereka sebagai petani sekaligus ibu rumah tangga.

Rahmah (41 tahun), misalnya, mengungkapkan; “Saya sudah sangat lelah dengan tugas di rumah dan harus menjaga anak jadi tidak tertarik menjadi pengurus. Tapi kalau ada yang mau silahkan saja”.

Selain itu, ada pula anggota perempuan yang tidak bisa mengendarai sepeda motor. Sementara sebagai pengurus koperasi dituntut untuk bisa *mobile* dalam bepergian ke sana-sini guna tugas perkoperasian. Bergabungnya perempuan ke dalam koperasi membuat keluarga mereka bisa memperoleh keuntungan berlipat. Di samping suami yang memperoleh manfaat-manfaat, para istri juga bisa membawa pulang hal-hal yang sama.

Manfaat lainnya adalah adanya pelatihan teknis perkebunan kopi. Rukayah antara lain pernah mengikuti pelatihan memangkas kopi yang benar, dan aktivitas ini amat bermanfaat baginya sebagai pekebun. Ia memantapkan pengetahuannya di kebun. Sementara untuk kebun sendiri, kehadiran koperasi membuat penjualan kopi mendatangkan keuntungan lebih besar.

Menjual kopi ke koperasi selalu dirasa lebih aman dan menguntungkan. Koperasi kenyataannya berkontribusi pada kesejahteraan petani dalam hal sandang dan pangan (bukan sebatas pangan). Misalnya, dalam waktu-waktu tertentu anggotanya menerima selimut, sembako, seng untuk pondok kebun, dan barang-barang tembikar rumah tangga (pecah belah).

Dalam konteks pengetahuan pertanian, koperasi memfasilitasi terselenggaranya aneka pelatihan peningkatan kecakapan. Koperasi berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai proses produksi komoditas pertanian dari hulu ke hilir, termasuk kompetensi petani dalam hal kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang beroperasi dalam bisnis kopi. Berkat pelatihan-pelatihan itu pula perempuan petani punya ilmu baru untuk menjaga mutu dan meningkatkan jumlah produksi kopi.

Pelatihan lainnya adalah bagaimana menangani-mengolah sampah di kebun, cara memanen kopi yang lebih baik, kiat menyajikan kopi, dan sosialisasi larangan menggunakan pupuk dan pestisida kimia.

Rata-rata perempuan diizinkan oleh suaminya untuk bergabung dalam koperasi—sebagaimana mereka dibolehkan ikut menggarap ladang. Namun karena keberadaan koperasi khusus wanita, para perempuan memang lebih menyukai koperasi ini. Mereka menamai koperasi yang keanggotaannya terdapat laki-laki sebagai “koperasi campuran”. Artinya, laki-laki maupun perempuan boleh bergabung di situ. Akan tetapi di koperasi perempuan, hanya perempuan saja yang bisa menjadi anggota. Izin dari suami merupakan salah satu syarat untuk bergabung ke koperasi khusus perempuan. Dengan demikian, biarpun laki-laki tetap memiliki pengaruh pada koperasi tersebut.

Perempuan yang menjadi kolektor lazimnya bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Di koperasi, keuntungan yang mereka terima juga lebih besar. Selain itu secara peran, perempuan kolektor juga lebih memiliki pengaruh dibandingkan perempuan yang hanya menjadi petani. Namun para kolektor ini tetap memandang semua perempuan mesti punya kesetaraan dalam menduduki posisi-posisi penting di dalam koperasi. Rukayah adalah salah satu perempuan petani-kolektor yang memiliki pandangan atau sikap demikian:

“Menurut saya wanita juga seharusnya diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan penting di koperasi karena jika berusaha wanita juga pasti akan mampu. Banyak keuntungan bagi wanita seperti bebas berpendapat, menambah pengetahuan dan keterampilan, mendapatkan banyak kenalan serta bisa mendapat pendapatan tambahan.”

Rizkiani adalah seorang manajer salah satu koperasi. Punya jabatan bagus, ia tetap menaruh hormat kepada perempuan lain yang tidak menduduki posisi manajer seperti dirinya.

“Ya, saya sebagai manajer di koperasi. Hal ini sangat menguntungkan bagi saya karena bisa meningkatkan kemampuan sebagai wanita dan bisa membantu banyak wanita lain (anggota koperasi) untuk berkembang. Menurut saya wanita seharusnya diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan penting di koperasi karena wanita juga bisa memimpin jika memiliki keberanian, kekuatan hati, keteguhan dan semangat pantang menyerah. Dukungan suami sangat dibutuhkan sebagai faktor pendorong wanita untuk menjadi delegasi koperasi. Keinginan yang kuat juga sangat dibutuhkan. Syarat lainnya untuk menjadi delegasi adalah memiliki manajemen waktu yang baik dan diutamakan bisa membawa kendaraan roda dua.” (Hasil wawancara dengan Rizkiani)

Jadi, koperasi yang dikelola dengan benar memnberikan manfaat bagi semua anggotanya. Bagi perempuan Gayo, berikut manfaat-manfaat yang dirasakan dengan adanya koperasi khusus perempuan:

- Mendapat bantuan dari premi organik berupa sembako, selimut, bahan bangunan, dan perkakas pertanian.
- Koperasi membeli kopi petani dengan harga yang layak.
- Memperoleh pendapatan tambahan dari bantuan koperasi.
- Bisa bertukar pendapat dan *curhat* dengan sesama anggota koperasi.
- Saat pergi ke kebun bisa menitipkan anak di PAUD yang dikelola oleh koperasi.
- Perempuan yang menduduki jabatan pengurus koperasi memiliki tambahan penghasilan, yakni dari gaji bulanannya sebagai pengurus koperasi. Jabatan yang boleh dibilang paling prestisius di sini adalah manajer (ketua) dan bendahara koperasi.

Tidak semua petani perempuan di Gayo adalah anggota atau bergabung dengan koperasi. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan koperasi di tingkat desa. Persoalan ini berhubungan juga dengan minimnya informasi yang dimiliki para petani perempuan

mengenai koperasi kopi. Informasi tersebut meliputi manfaat koperasi, bagaimana cara menjadi anggota, apa keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh di luar konteks pertanian, dan beberapa lainnya. Warga di desa-desa yang tak memiliki koperasi menjadi petani biasa, yang mana pendapatannya terbatas dari menjual hasil panen kopi.

Tidak adanya koperasi berbenturan dengan harapan kaum perempuan Gayo. Mereka sangat berharap di desanya berdiri sebuah koperasi yang bisa memberikan manfaat sebagaimana yang dirasakan petani-petani perempuan di desa lainnya yang sudah menjadi anggota koperasi setempat. “Saya ingin menjadi anggota koperasi jika diizinkan,” kata Suriati.

Kokowagayo: Dari Dataran Tinggi ke Pentas Internasional

Semua koperasi di kalangan petani Gayo memberikan sumbangsih yang tak sedikit bagi mereka. Semua orang bangga akan koperasinya masing-masing. Namun di antara itu, yang paling merasa bangga barangkali adalah semua perempuan yang tergabung di dalam Koperasi Kopi Wani Gayo (Kokowagayo). Alasan utamanya, koperasi mereka sudah punya nama di tingkat internasional. Koperasi ini berada di Kabupaten Bener Meriah.

Kokowagayo telah banyak makan garam di pasar internasional. Koperasi ini menjadi satu-satunya koperasi wanita di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam organisasi petani kopi wanita internasional berbasis di Peru, Amerika Selatan, yaitu Organic Product Trading Company (OPTCO) Cafe Femenino.

Jumlah anggota koperasi Kokowagayo sebanyak 409 perempuan dengan total lahan yang dikelola seluas 342 hektare. Kokowagayo menjual kopi (*green bean*) ke berbagai benua, dengan rincian, 70 persen ke AS, 20 persen ke Eropa, dan 10 persen ke Australia. Total produksi kopi oleh Kokowagayo dalam satu tahun mencapai 450.000 ton. Saat ini aset Kokowagayo mencapai Rp8,5 miliar (“Mengenal Kokowagayo, Koperasi Kopi Wanita Gayo yang Mendunia”, *Kompas*, 21-6-2021). Kiprah Kokowagayo juga mendapat apresiasi dari Menteri UKM Teten Masduki. Dia mengatakan, "Kokowagayo ini sudah mendunia. Menjadi kebanggaan Indonesia, bahwa ada koperasi wanita kiprahnya diakui secara internasional" (<https://www.merdeka.com/peristiwa/menkopukm-aceh-punya-koperasi-wanita-gayo-yang-mendunia.html> diakses pada 21 November 2021, pukul 09.45 WIB).

Kokowagayo bisa menjadi rujukan pengelolaan koperasi perempuan, tidak hanya bagi petani perempuan Gayo, melainkan juga koperasi perempuan lainnya dalam berbagai bidang, mengingat keberadaan koperasi khusus perempuan di Aceh masih sangat kurang. Jika lahir

satu saja Kokowagayo di satu kabupaten yang bergerak di berbagai bidang, akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Perempuan dan Pengetahuan: Kontribusi Lulusan Universitas Malikussaleh dalam Pertanian di Gayo

Dari populasi petani perempuan Gayo, terdapat satu fragmen populasi yang unik karena para perempuan lulusan Fakultas Pertanian di perguruan tinggi. Bagian ini akan mengulas bagaimana para perempuan tersebut kembali ke kampung halamannya setelah lulus dari program-program studi pertanian di Universitas Malikussaleh untuk mengimplementasikan pengetahuannya.

Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Aceh Utara melalui beberapa program studi seperti Agribisnis, Agroekoteknologi, Budidaya Perairan, dan Ilmu Kelautan telah menghasilkan ribuan sarjana pertanian. Semua lembaga itu harus mempertimbangkan bahwa praktik pertanian mesti mengandung penekanan gender. Boleh dikata, jurusan-jurusan ini juga turut berupaya menciptakan sarjana-sarjana perempuan yang dapat menjadi pilar ketahanan pangan. Namun untuk mengetahui secara lebih pasti, kita perlu melihat tindakan atau aktivitas penerapan ilmu yang dilakukan para lulusannya di lapangan (lahan).

Universitas Malikussaleh sejak 1969 hingga tahun 2019 memiliki 12.750 lulusan. *Tracer study* pada 2019 menunjukkan bahwa 48,49 persen lulusan memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Penyebabnya, mereka berpikir yang penting memiliki pekerjaan. Apa pun itu, apa saja ada pekerjaan yang bisa diakses dengan mudah, akan ditekuni. Terutama yang dekat dengan rumahnya. Dan tentu saja yang juga menjadi pertimbangan adalah jumlah upah yang diterima memadai atau tidak.

Melihat fenomena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat gambaran bagaimana perguruan tinggi telah meningkatkan keterampilan lulusannya dalam hal penerapan pengetahuan yang diperolehnya ke dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks pertanian, bagaimana pengetahuan di Fakultas Pertanian bisa ditransfer dalam praktik bertani sehari-hari. Pengetahuan dari para lulusan bisa melengkapi sistem pertanian tradisional yang telah ada, sehingga berdampak pada naiknya tingkat produktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga.

Ketika meneliti implikasi produktivitas pertanian yang tinggi terhadap ketahanan pangan itu, penekanan juga dilakukan pada pengembangan penelitian berperspektif gender

untuk mengetahui sejauh mana lulusan laki-laki dan perempuan menerapkan pengetahuan yang mereka terima di tingkat universitas untuk memengaruhi pembangunan pertanian berkelanjutan di masyarakat, dan untuk memahami bagaimana pengetahuan yang mereka terima di universitas membantu meningkatkan sistem pertanian melalui teknologi baru yang diadopsi.

Dalam penelitian yang menerapkan metode kualitatif ini, diperoleh banyak keterangan dari para lulusan Universitas Malikussaleh yang bekerja di perkebunan. Antara lain soal bagaimana mereka meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Wawancara-wawancara yang dilakukan berhasil memetakan peran lulusan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pertanian rumah tangga dan kontribusinya di sektor pertanian masyarakat luas.

Penelitian ini, sebagaimana kajian-kajian sosial lainnya, tidak dapat menghindari faktor kesejarahan. Oleh karena di sini penting pula ditelusuri sejarah perkembangan pengetahuan lulusan yang menjadi petani di Tanah Gayo, khususnya perempuan.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Metode lazimnya dipakai dalam penelitian agama, sosial, dan budaya (Kaelan, 2012). Di dalamnya akan dilakukan observasi formal melalui proses wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, maupun berpartisipasi dalam beberapa kegiatan informan (Vredenburg, 1984).

Salah satu pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Penelitian etnografi dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu budaya masyarakat melalui pemahaman pandangan hidup yang berasal dari sudut pandang penduduk asli (suku setempat). Seperti yang dikemukakan oleh Malinowski dalam Spradley (1997), tujuan etnografi adalah untuk memahami sudut pandang orang, hubungannya dengan kehidupan, serta untuk mendapatkan pandangan mereka tentang dunia mereka.

Dengan penelitian etnografi, kami mencoba untuk mendeskripsikan pola pikir, budaya, dan cara keluarga petani mengadopsi dan mengubah pengetahuan para perempuan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh tentang sistem pertanian dan ketahanan pangan. Dari hasil penelitian ini, menghasilkan beberapa rekomendasi, baik kepada universitas maupun pemerintah mengenai suatu kebijakan baru. Di samping itu, terdapat sejumlah solusi kepada masyarakat untuk kepentingan ketahanan pangan yang berbasis gender.

Bukan cuma di dataran tinggi Gayo (Bener Meriah dan Aceh Tengah), penelitian untuk tema peran lulusan dalam pertanian juga melibatkan lulusan-lulusan di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Mereka berasal pula dari produksi komoditas pertanian yang beragam seperti kopi, padi, cabang, dan hasil pertanian utama lainnya. Pemilihan informan ditentukan sesuai dengan konteks informasi yang akan digali. Waktu penelitian ini berlangsung selama tiga bulan.

Pengetahuan adalah bagian paling penting dalam pertanian—serta pekerjaan-pekerjaan teknis lainnya. Ilmuwan pertanian dapat berperan dalam memberikan langkah menuju keberlanjutan pertanian. Namun, ilmuwan pertanian harus mampu mendidik diri mereka sendiri dan masyarakat sipil dengan paradigma sistem baru yang melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan serta multiaksi, bukan pada komponen tunggal realitas pertanian. Transdisipliner dalam teori dan praktik pertanian diperlukan untuk menghadapi tantangan baru di dunia pertanian maupun bisnis. Aplikasi dari metode yang dikembangkan dalam pembangunan pertanian di Indonesia telah mengungkapkan betapa perlunya aksi untuk melintasi batas-batas di dalam satu sistem.

Sekarang diakui secara luas bahwa masalah kemiskinan massal di negara-negara berkembang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang cepat. Yang juga amat diperlukan adalah bagaimana penduduk miskin bisa memiliki bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional tersebut. Akses ini dibuka dengan memfokuskan pendapatan nasional untuk meningkatkan pendapatan mereka, termasuk memperluas kesempatan bekerja.

Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh negara-negara maju dan banyak literatur ekonomi, upaya untuk memperluas kesempatan kerja sangat terkonsentrasi pada sektor nonpertanian. Sektor industri yang berkembang tidak banyak yang bergerak dalam bidang pertanian. Padahal kondisi perekonomian Indonesia ditopang sektor pertanian. Oleh karena itu, harus ada kiat yang lebih serius untuk memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian itu sendiri (Abey et.al, 1991).

Kekuatan sektor pertanian sudah teruji di masa pandemi Covid-19 di Indonesia sejak kasus pertama di temukan pada Maret 2020. Biro Pusat Statistik melaporkan sektor pertanian tumbuh positif sebesar 12,93 persen pada triwulan dua tahun 2021. Sektor pertanian berkontribusi 14,27 persen pada produk domestik bruto (PDB) nasional atau meningkat pada periode sama tahun sebelumnya.

Fakta ini mengingatkan kita semua bahwa sektor pertanian paling tangguh menghadapi pandemi sehingga harus meningkatkan fokus pembangunan di bidang pertanian. Masih banyak pekerjaan rumah untuk menuju peningkatan ketahanan pangan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan.

Tantangan-Tanggungan Sarjana Pertanian

Dalam konteks ketahanan pangan, kebijakan yang dibuat lebih banyak mengacu pada pandangan pihak pemerintah. Padahal peran serta akademisi dan lulusan perguruan tinggi diperlukan untuk dapat secara mandiri membantu masyarakat mewujudkan ketahanan pangan keluarga, serta membantu pemerintah mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Sebagaimana tertuang dalam Tridarma Perguruan Tinggi, terdapat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengajaran kepada mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan sarjana yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja global. Selain itu, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah menciptakan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi pertanian, misalnya dengan teknologi pertanian tepat guna, benih unggul, pupuk, dan lain-lain. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi berperan dalam mentransfer inovasi teknologi penelitian yang telah dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan teknologi tersebut. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian rakyat.

Persoalan yang dihadapi petani, terutama petani perempuan di Gayo, bukan cuma akses mereka untuk memengaruhi kebijakan pangan pemerintah. Secara mendasar, ternyata sebagian besar alumni tidak memiliki tanah meskipun berasal dari keluarga petani. Keluarga mereka menyewa lahan pertanian orang lain sekitar 0,5 hingga 1 hektare. Namun ada juga yang memiliki lahan sendiri, dengan luas mulai dari 1 hingga maksimal 100 hektare. Kepemilikan tanah ini sebagian berasal dari warisan orang tua.

Dalam pertanian, diterapkan teknologi tertentu. Lulusan perempuan menyatakan bahwa teknologi lebih banyak membantu laki-laki dalam kegiatan pertanian seperti mesin pemotong rumput dan traktor tangan. Laki-laki lebih banyak menggunakan mesin di bidang pertanian karena lebih memahami cara mengoperasikan mesin dibandingkan perempuan, sehingga perempuan masih bekerja menggunakan teknologi konvensional. Contohnya ketika memanen kopi dengan tangan, bukan menggunakan mesin. Namun, perempuan menganggap bahwa

pengetahuan dan teknologi sangat membantu keluarga mereka dalam melakukan kegiatan pertanian. Saat ini, mereka masih memanen kopi secara manual karena belum ada teknologi yang mendukungnya. Selain itu, memanen kopi secara manual dapat menyerap banyak tenaga kerja wanita karena mudah dilakukan, tidak memakan banyak waktu untuk bekerja.

Syarat menjadi pemanen kopi adalah memahami ciri-ciri biji kopi yang sudah matang. Setelah panen, kopi juga disortir menurut ukuran dan kualitasnya secara manual karena tidak semua petani kopi memiliki mesin sortir kopi. Penyortiran ini dilakukan mulai siang hingga sore hari setelah penjemuran selesai. Biasanya petani kopi yang sudah tergabung dalam koperasi hanya memetik kopi dan mengeringkannya.

Di koperasi akan ada penyortir kopi skala besar. Sebagian besar petani laki-laki menggunakan teknologi seperti traktor, mesin babat, dan pabrik kopi. Namun, ada juga beberapa petani perempuan yang menggunakan mesin traktor dan penyemprot untuk menyuburkan kopi. Sejumlah perempuan tani tampak kurang mahir menggunakan alat pertanian karena sebagian pekerjaan mereka seperti memanen tidak menggunakan mesin pertanian. Situasi-situasi ini membuat para lulusan perempuan tertekan. Untungnya suasana keluarga serta masyarakat tetap suportif. Pertemanan sesama petani menciptakan sistem saling dukung secara moral bahkan finansial melalui pemberian kerja secara berkala dengan tingkat upah tertentu.

Pengaruh Kurikulum terhadap Kecakapan Petani Perempuan

Salah satu indikator sistem pendidikan yang baik adalah kualitasnya *output* pendidikan itu sendiri. Untuk mengukur kualitas sarjana yang dihasilkan dapat dipakai beberapa ukuran seperti prestasi, kompetensi, respons, dan percepatan karier.

Berdasarkan data *tracer study* Universitas Malikussaleh tahun 2019, hanya 51,51 persen lulusan Fakultas Pertanian yang bekerja berdasarkan kompetensi keilmuannya. Artinya, sudah lebih dari separuh lulusan Fakultas Pertanian memanfaatkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam membangun karier di bidang pertanian. Akar tradisi bertani dalam keluarga dapat mendorong lulusan universitas untuk kembali ke rumah dan melanjutkan tradisi pertanian keluarga (Bednaříková et.al, 2016).

Di sisi lain, 48,49 persen lulusan tidak bekerja mengikuti ilmu yang mereka terima di universitas. Alasan utama untuk mulai memilih pekerjaan yang tidak relevan dengan

pengetahuan mereka adalah mereka percaya bahwa pada awal meniti karier, mereka harus menerima pekerjaan apa pun meskipun itu tidak terkait dengan pendidikan mereka. Sementara alasan kedua adalah pekerjaan yang dilakoni memiliki prospek karier yang lebih baik dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Pekerjaan yang dirasa prospektif itu misalnya bekerja di bank atau sektor industri manufaktur. Dan meskipun telah menyebabkan perubahan struktural ke arah sektor industri, sektor pertanian masih memberikan kontribusi tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase 33,57 persen untuk penduduk laki-laki dan 31,71 persen untuk penduduk perempuan (Asian Development Bank, 2013).

Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan 30 alumni Fakultas Pertanian dan 10 alumni Fakultas Teknik serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wawancara dilakukan tim peneliti dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari pada Agustus 2020. FGD dilakukan mengikuti protokol Covid-19. Beberapa keterbatasan akibat Covid-19 seperti pertemuan kelompok yang lebih besar dan tidak dapat menghabiskan waktu lebih lama untuk wawancara. Dua permasalahan itu telah diselesaikan melalui wawancara telepon.

Untuk pengumpulan data sekunder, artikel dipiliha menjadi dua bagian, yakni menjadi dokumen publik dan pribadi. Dokumen publik seperti laporan rapat, surat kabar, data dari Balai Penyuluhan Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah. Dokumen pribadi seperti jurnal, bab buku, buku harian, atau surat-surat yang berkaitan dengan perempuan, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan.

Meskipun para perempuan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh mendapatkan ilmu dan keterampilan yang sama dalam perkuliahan, sebagian besar di antara mereka tidak bekerja karena setelah lulus karena lebih memilih menikah dan mengurus keluarga. Alih-alih segera mencari tempat untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah (Universitas Malikussaleh, 2019). Butuh sekitar tiga sampai empat tahun bagi seorang wanita untuk benar-benar menemukan pekerjaan di bidang keahliannya.

Mereka yang belum terus mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan bidang studinya. Sambil menunggu kesempatan itu tiba, mereka menjalani “pekerjaan apa adanya” terlebih dahulu. Masalah ini, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016), sebenarnya dapat memunculkan ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja seperti partisipasi tenaga kerja laki-laki yang relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tanggung jawab mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki dan tanggung jawab utama

terkait pekerjaan rumah tangga tanpa upah adalah domain perempuan dan anak perempuan. Menurut sebagian besar alumni, keberhasilan dalam pekerjaan petani perempuan dapat membuat mereka naik ke status yang lebih tinggi dalam keluarga atau masyarakat. Keberhasilan berarti membesarnya pendapatan; dan besarnya pendapatan berarti tersejahterakannya keluarga. Petani perempuan bahkan bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dengan hasil pertanian yang mereka dapatkan. Namun ada juga lulusan yang menyatakan bahwa mungkin petani perempuan akan terpandang di masyarakat tetapi dalam keluarga selalu laki-laki (suami/ayah) yang menjadi kepala dan kepala keluarga meskipun penghasilannya di bawah perempuan (istri/ibu).

Alumni mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, namun ada juga yang tidak. Karena latar belakang keluarga mereka adalah petani, terkadang mereka juga bekerja di pertanian tetapi tidak terlalu intensif. Pertanian hanyalah pekerjaan sampingan yang dilakukan dan tidak menjadi pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan sampingan sambil menunggu pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya karena lulusan yang diwawancarai bukan lulusan Fakultas Pertanian. Mereka memutuskan untuk bekerja di pertanian sebagian besar karena alasan pribadi dan keluarga, seperti bekerja di perkebunan/ladang keluarga atau pekerjaan apa pun yang tersedia.

Sebenarnya lulusan perempuan ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan, bank, dan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, banyak perusahaan yang membuat syarat (berpenampilan menarik dan belum menikah). Karena memiliki penampilan fisik yang kurang menarik dan ada juga yang sudah menikah, lulusan perempuan memutuskan untuk membuka usaha sendiri atau bekerja di ladang milik orang tua. Alasan lainnya adalah yang lebih dominan bekerja adalah laki-laki. Namun, sulit bagi informan perempuan dari Fakultas Pertanian untuk bekerja karena status perkawinan dan kekuatan fisik mereka yang tidak sebanding dengan lulusan laki-laki.

Materi-materi ilmu pertanian yang diajarkan di universitas ada yang bermanfaat langsung secara praktis tetapi terdapat juga yang kurang relevan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Para lulusan tidak menafikan tumbuhnya kecakapan tertentu akibat terpapar pengetahuan di universitas, tetapi mereka merasa pemerolehan pengetahuan pertanian yang lebih penting adalah belajar langsung dari petani. Pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari dua sumber tersebut—universitas dan masyarakat tani—bisa dipadukan dalam praktik bertani sehari-hari.

Hal yang dirasa cukup mendesak ditingkatkan dalam kurikulum ilmu pertanian di universitas adalah menambah porsi praktikum baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya praktikum yang intens, jarak antara pengetahuan universitas dengan pengetahuan di lapangan semakin terpendek. Kedekatan keduanya merupakan syarat mutlak untuk membangun suatu perpaduan.

Struktur dan komponen kurikulum belum sepenuhnya mendukung kebutuhan dalam pekerjaan lulusan, terutama di sektor pertanian. Secara kognitif memang membangun pengetahuan yang menuntut suatu praktik yang terukur kendati sejauh ini masih kurang. Persoalan lainnya adalah tidak semua dosen adalah praktisi pertanian atau petani. Pengetahuan dari praktisi tentu lebih membumi dibandingkan penjabaran teori, konsep, atau teknik secara tekstual. Dalam konteks perbaikan kurikulum, para lulusan mengharapkan terbangunnya suatu struktur kurikulum yang akan mengarah terberdayanya masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua kebutuhan utama mereka, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan meningkatnya kecakapan dalam manajemen pertanian. Keterampilan pertanian yang diajarkan di kampus tidak mendalam, dalam kata lain tidak terperinci. Padahal pertanian adalah pekerjaan yang amat menuntut aspek kedalaman-ketepatan teknis.

Tidak semua lulusan pertanian bekerja sebagai petani. Mereka yang kemudian bekerja sesuai bidang studinya lazimnya adalah anggota keluarga yang memiliki lahan pertanian. Di sini, alasan bertani bercampur antara faktor pribadi maupun keluarga. Tetapi terdapat pula lulusan yang tidak bersikap linier demikian. Bagi kelompok lulusan ini, bertani hanyalah salah satu pilihan. Apabila ada pekerjaan yang lebih prospektif atau menguntungkan secara finansial serta pengembangan kemampuan diri, bertani tidak menjadi pilihan.

Bagi lulusan yang memiliki lahan, kurang mendalamnya pengetahuan yang diajarkan di universitas tidaklah menjadi masalah kentara. Karena terlibat langsung dalam praktik pertanian sehari-hari, kiat-kiat praktis yang dibutuhkan untuk pengelolaan lahan bisa diperoleh langsung. Hal-hal yang tidak ditemukan di ruang belajar universitas banyak ditemukan di kebun maupun diskusi-diskusi dengan petani lain.

Akan tetapi, kelemahan kurikulum tersebut berdampak besar terhadap lulusan yang hendak bekerja di sektor industri pertanian. Dalam seleksi tenaga kerja, mereka kesulitan bersaing dengan lulusan-lulusan dari banyak universitas ternama yang kurikulumnya mampu menyajikan pengetahuan teoritis maupun keterampilan teknis pertanian yang lebih baik.

Situasi ini berkelindan dengan faktor-faktor lain seperti kesulitan menemukan informasi lowongan kerja dan kurangnya kemampuan berkomunikasi.

Mayoritas alumni tidak terlibat dalam program pembangunan pertanian di desanya. Sementara di antara yang mengaku terlibat, hanya sedikit yang tahu persis bagaimana program tersebut hendak dijalankan. Hal ini barangkali karena mereka tidak menghadapi masalah-masalah yang berat dalam pertanian. Para alumni yang dimaksud tak pernah misalnya menghadapi kerawanan pangan. Mereka merasa desanya sudah makmur, situasi yang didatangkan oleh hasil-hasil pertanian. Di samping itu, program-program pembangunan pertanian yang belakangan ada justru datang setelah modernisasi tercapai. Modernisasi pertanian di Gayo membantu petani meningkatkan produksi serta memudahkan mereka dalam bekerja, antara lain ketika pembuatan pupuk organik dan non-organik.

Sayangnya modernisasi ini tidak menjalar ke seluruh tempat. Terdapat beberapa petani yang menolak pemakaian mesin-mesin termutakhir karena dapat menggantikan tenaga manusia atau buruh tani. Para buruh tani juga memerlukan pekerjaan, dan para pemilik lahan selalu ingin membantu mereka tetap memiliki pekerjaan. Selain mesin, komponen termutakhir yang dihadirkan dalam modernisasi pertanian adalah pestisida yang dibuat dan bisa diterapkan dengan teknologi. Inilah dilema petani lulusan Fakultas Pertanian. Di satu sisi mereka mendapatkan pengajaran teori maupun praktik penggunaan alat-alat teknologi pertanian yang bisa dipakai secara praktis di lahan. Di sisi lain ada kekerabatan sosial yang mencegah mereka menerapkan teknologi secara menyeluruh karena dapat menyingkirkan sahabat, tetangga, atau saudara mereka yang bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian (dibayar per pekerjaan).

Ilmu yang didapat di universitas bermanfaat namun ada juga yang kurang relevan sehingga perlu ditingkatkan. Mahasiswa perlu belajar langsung dari masyarakat dan mempraktekkan apa yang mereka terima di universitas. Praktikum di perguruan tinggi masih kurang sehingga perlu ditambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara keseluruhan dari segi kognitif pelajaran di kampung meningkatkan pengetahuan namun yang masih kurang adalah praktik di lapangan.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus para sarjana dari Program Studi Agribisnis dan Agroekoteknologi. Alumni Program Studi Agribisnis Universitas Malikussaleh hanya sedikit memperoleh pengajaran tentang teknologi pertanian dalam kurikulumnya. Hal ini dikarenakan porsi yang menjadi fokus adalah pemasaran, penyuluhan, komunikasi pertanian, analisis

ekonomi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Pengajaran teknologi pertanian mendapat porsi yang besar di Program Studi Agroekoteknologi dan Budidaya Perairan. Berdasarkan wawancara, lulusan Agribisnis cenderung cakap mengimplementasikan pengetahuan yang dahulu diperolehnya di ruang kelas ke dalam praktik pemasaran hasil pertanian sehari-hari. Pengetahuan yang dikoleksi amat membantu mereka dalam profesinya. Akan tetapi, bukan berarti sarjana yang tak berkuliah di Agroekoteknologi tidak bisa mengoperasikan teknologi pertanian.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah sarjana teknik sipil, arsitektur, atau teknik mesin tidak belajar tentang teknologi pertanian tetapi mereka dapat menjalankan mesin pertanian. Mereka mempelajari dari orang terdekat, karena memang berasal dari keluarga petani. Di samping itu, mereka juga bisa mempelajari penggunaannya melalui konten-konten internet. Dengan demikian, pengetahuan di universitas sebetulnya tak “lengkap”. Kekurangan kurikulum itu ditutupi dengan ilmu-ilmu praktis yang diperoleh langsung dalam bertani.

Melihat kelemahan-kelemahan yang ada, penting kiranya memberikan umpan balik kepada kurikulum sebagai acuan dalam melakukan pembenahan ke depannya. Berikut hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum:

- Kewirausahaan
- Kepemimpinan
- Kecakapan berkomunikasi di depan umum (untuk pemasaran produk)
- Keterampilan komputer
- Inovasi teknologi pertanian
- Praktik kerja lapangan
- Analisis peluang bisnis

Poin-poin ini memiliki relevansinya masing-masing dengan isu ketahanan pangan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, upaya pemenuhan pangan bukan cuma soal tersedianya makanan. Ini juga soal membangun suatu sistem yang lebih kokoh, sistem yang dapat bergeming manakala tiba masa-masa kerawanan pangan yang dapat memelaratkan kehidupan ribuan keluarga petani.

PENUTUP:

PERAN EKONOMI DAN BUDAYA

Upaya petani perempuan di Gayo dalam memperjuangkan kedaulatan pangan bagi keluarga maupun masyarakat merupakan satu dari banyak perjuangan perempuan di seluruh dunia dalam konteks ketahanan pangan. Perjuangan ini dilakukan tentunya bersama-sama dengan lelaki. Kedua pihak saling melengkapi untuk mempekuat ketahanan pangan keluarga.

Di rumah, pembagian kerja didasarkan pada kekuatan fisik, keterampilan, dan kebiasaan. Laki-laki melakukan kerja yang menuntut kekuatan fisik seperti membersihkan lahan, mengolah lahan, dan menanam. Pekerjaan perempuan lebih pada memelihara tanaman dan panen, tetapi keduanya sama penting dan saling mendukung. Kegiatan pascapanen dilakukan secara bersama-sama, seperti penggilingan dan pengeringan biji kopi. Sementara itu, pemasaran dilakukan oleh laki-laki karena perempuan bertugas mengurus urusan rumah tangga atau keluarga.

Akan tetapi, pembagian peran tersebut menyisakan kesulitan lain bagi perempuan, sementara di sisi lain peran-peran yang diambil laki-laki justru sedikit-banyaknya dapat “tertangani” dengan keberadaan teknologi. Petani perempuan menyatakan bahwa teknologi lebih banyak membantu laki-laki dalam kegiatan pertanian seperti mesin pemotong rumput dan traktor tangan. Laki-laki lebih banyak menggunakan mesin di bidang pertanian karena lebih memahami cara mengoperasikan mesin dibandingkan perempuan, sehingga perempuan masih bekerja menggunakan teknologi konvensional seperti memanen kopi dengan tangan, tidak menggunakan mesin.

Meskipun perempuan yang menjadi sarjana pertanian telah menimba ilmu dan keterampilan yang sama di universitas, namun mereka tertinggal oleh alumni laki-laki dalam hal praktik yang dilakukan di lahan pertanian. Alasan di baliknya adalah pada umumnya laki-laki lebih tertarik pada mesin dibandingkan dengan perempuan, tugas yang diberikan kepada laki-laki di lahan pertanian memaksa mereka untuk menggunakan mesin dan teknologi, laki-laki terlihat cukup pintar untuk mencoba dan mengelola mesin dibandingkan dengan perempuan dan beberapa mesin. membutuhkan energi untuk beroperasi sehingga membatasi peran perempuan. Namun, perempuan menganggap bahwa pengetahuan dan teknologi sangat membantu perempuan dalam melakukan kegiatan pertanian. Mereka menuntut mesin dan

teknologi yang dapat mendukung mereka untuk melakukan bagian pekerjaan mereka dengan lebih baik dan lebih cepat, mengingat keterbatasan keterampilan dan minat mereka yang rendah untuk menggunakan mesin.

Ilmu yang didapat di universitas bermanfaat namun ada juga yang kurang relevan sehingga perlu ditingkatkan. Mahasiswa perlu belajar langsung dari masyarakat dan mempraktikkan apa yang mereka terima di universitas. Praktikum di perguruan tinggi masih kurang sehingga perlu ditambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, kualitas dosen juga perlu ditingkatkan dan kurikulumnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Kurikulum yang diberikan selama kuliah sudah baik, membangun sikap kemandirian dan rasa tanggung jawab.

Alumni perempuan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, namun ada juga yang tidak. Karena latar belakang keluarga mereka adalah petani, terkadang mereka juga bekerja di pertanian tetapi tidak terlalu intensif. Pertanian hanyalah pekerjaan sampingan yang dilakukan dan tidak menjadi pekerjaan utama, atau sebagai pekerjaan sampingan sambil menunggu pekerjaan yang cocok.

Lulusan perempuan ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan, bank, dan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, banyak perusahaan membuat kondisi seperti terlihat menarik dan belum menikah. Alasan lainnya adalah yang lebih dominan bekerja adalah laki-laki. Tantangan lain yang dihadapi oleh para alumni, banyak saingan dari universitas ternama yang memiliki *skill* dan pengetahuan yang lebih baik, informasi lowongan kerja yang kurang, kurangnya kesempatan kerja, dan sulitnya berkomunikasi dengan baik.

Pekerja pertanian pada dasarnya terdiri dari keluarga inti. Namun, jika personel keluarga inti tidak mencukupi, mereka menawarkannya kepada keluarga lain atau tetangga dekat/keluarga besar. Jika tidak ada yang bisa membantu, maka mereka menyewa buruh tani untuk membantu menggarap lahan. Jika pekerja berasal dari tetangga/keluarga besar, ada dua pilihan: dibayar dengan uang atau timbal balik tenaga kerja saat akan melakukan kegiatan pertanian di kemudian hari. Gaji buruh tani yang terlibat tergantung dari jenis pekerjaan, kuantitas, dan keterampilan yang dimiliki. Namun jika pekerja berasal dari keluarga inti, maka diberikan sesuai dengan kontribusinya pada kegiatan pertanian. Orang tua mereka mengajari mereka cara bertani sejak kecil, sehingga nantinya mereka bisa melanjutkan usaha pertanian orangtua mereka.

Keberhasilan dalam pekerjaan petani perempuan dapat membuat mereka naik ke status yang lebih tinggi dalam keluarga atau masyarakat karena pendapatan yang mereka terima akan memengaruhi perekonomian keluarga. Petani perempuan bahkan bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dengan hasil pertanian yang mereka dapatkan. Namun masyarakat tetap akan melihat laki-laki (suami/ayah) yang menjadi kepala keluarga dan kepala keluarga meskipun penghasilannya di bawah istri/ibu.

Besarnya produksi pertanian tergantung pada luas lahan yang dimiliki, kualitas, dan cuaca. Hasil panen dijual dan terkadang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Pasar untuk hasil pertanian selalu ada, tetapi tidak ada jaminan harga. Peluang petani untuk menjual hasil panennya sebenarnya sangat besar, namun terkadang permainan pasar sangat mengganggu petani yang mengharapkan harga sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Pemasaran hasil pertanian terkadang juga dijual kepada pedagang besar atau dikenal dengan istilah “toke” untuk menutupi hutang sebelum panen (biasanya untuk membeli alat-alat produksi seperti peralatan, pupuk, pestisida, atau kebutuhan keluarga) sehingga petani hanya memperoleh keuntungan yang kecil.

Saluran pemasaran melalui agen ini tidak terlalu menguntungkan dalam hal pendapatan karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi saluran pemasaran ini adalah saluran pemasaran tercepat dan agen datang langsung ke tanah mereka dan membawa produk pertanian tanpa petani harus repot memikirkan transportasi untuk penjualan. Selain agen, saat ini beberapa petani telah bergabung dengan koperasi petani untuk menjual hasil pertanian mereka dan harga yang mereka dapatkan lebih adil. Ada juga konsumen yang datang langsung ke petani untuk membeli, namun hal ini sangat jarang terjadi. Selain menanam tanaman inti, petani juga menanam tanaman sayuran di pekarangan atau sisa lahan perkebunan untuk dijual ke pasar atau untuk konsumsi pribadi. Akibat Covid-19, harga produk pertanian turun meski tidak signifikan. Kondisi ini lebih disebabkan karena menurunkannya daya beli masyarakat.

Riset ini juga menunjukkan bahwa masalah yang sama menghambat petani kopi perempuan untuk maju melalui keanggotaan dalam koperasi. Keanggotaan dalam koperasi kopi mungkin berpotensi bagi petani perempuan untuk mengakses sumber daya dan peluang untuk unggul dan mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi norma budaya mempersulit mereka untuk memanfaatkan segenap potensi yang ada. Dengan demikian, masih ada norma penghalang bagi perempuan untuk diperlakukan setara dengan laki-laki. Lebih jauh lagi,

kepemilikan tanah telah memberi laki-laki keunggulan sejauh kepemilikan tanah merupakan prasyarat untuk keanggotaan koperasi, membuat banyak perempuan terpinggirkan.

Selain memastikan bahwa lebih banyak perempuan memasuki sektor kopi, serta sektor pertanian, sebagai pekerja formal ada kebutuhan strategi bisnis untuk memasukkan perempuan sebagai pengambil keputusan di sektor ini untuk menghasilkan kesetaraan gender yang lebih besar. Tidak diragukan lagi, meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ini akan memberikan efek berganda yang positif bagi kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. Pengakuan atas peran penting perempuan dalam pembangunan Indonesia sudah terlambat, tetapi masih dapat diwujudkan segera.

Para perempuan petani di Gayo merasa tidak ada diskriminasi atau eksploitasi terhadap mereka. Peran mereka cukup dihormati oleh laki-laki, baik suaminya sendiri maupun masyarakat. Secara ekonomi, kerja para perempuan tersebut juga diapresiasi dengan upah yang layak. Tidak ada perempuan yang dikuras tenaganya tetapi tak memperoleh pendapatan apa pun. Kalaupun ada perempuan yang mengolah kebun atas dasar ajakan atau perintah suami, mereka tidak menganggap itu sebagai pemaksaan. Para perempuan Gayo paham bahwa berkebun untuk menanam-memanen-meminum kopi adalah bagian inti dari kebudayaan mereka. Dan demi memastikan hubungan historis itu terjaga selamanya, para perempuan turun tangan.

Artinya, para perempuan yang berkebun bukan cuma menjalankan fungsi ekonomi. Mereka juga menjalankan fungsi budaya. Keduanya masih bisa dioptimalkan dengan dukungan kebijakan politik serta keberpihakan terhadap perempuan agar peran perempuan Gayo yang bertani kopi—dan perempuan di daerah lain—menjadi pilar pangan dan kebudayaan masyarakatnya.[]

BIBLIOGRAFI

- Agustia, D., Kusnadi, N. and Harianto (2017) “Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh”, *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 14 (1).
- Adeyemo, R. (2004) “Self-help farmer cooperatives’ management of natural resources for sustainable development in southwest Nigeria”, *Journal of Rural Cooperation* 32 (1): 3–18.
- Azhari, Syechalad, A.M.N., Hasan, I. and M.S.A. Majid (2017) ‘The role of cooperative in the Indonesian economy’, *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6 (10): 43–46.
- Baga, L.M. (2013) Co-operative entrepreneurs and agribusiness development, a study towards the development of agribusiness co-operatives in Indonesia. *Doctoral dissertation, Philipps-Universität Marburg 2013 Wirtschaftswissenschaften*.
- Badan Pusat Statistik (2016) Indonesian statistics. [URL:<www.bps.go.id>](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah (2021) ‘Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2020’. Jakarta: BPS Press: 40–42.
- Bappenas. 2001. *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*.
- Barton, D. G. (2000) ‘What is a Cooperative?’, Unpublished paper, Kansas State University.
- Bhuyan, S. (2007) ‘The “people” factor in cooperatives: an analysis of members’ attitudes and behavior.’ *Canadian Journal of Agricultural Economics* 55 : 275–98.
- Bretos, I. and C. Marcuello (2017) ‘Revising globalization challenges and opportunities in the development of cooperatives’, *Annals of Public and Cooperative Economics* 88 (1): 47–73.
- Datta, P.B. and R. Gailey (2012) ‘Empowering women through social entrepreneurship: case study of a women’s cooperative in India’, *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36 (3): 569–587.
- Dede Rosyada. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media.
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Dikdasmen Depdiknas.
- Echols, John M., dkk. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ferguson, H. and T. Kepe (2011) ‘Agricultural cooperatives and social empowerment of women: a Ugandan case study’, *Development in Practice*, 21 (3): 421–429.
- Ghebremichael, B. (2013) ‘The role of cooperatives in empowering women’, *Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR)* 2 (5): 51–54.

- Hakelius, K. (1996) *Cooperative Values: Farmers' Cooperatives in the Minds of the Farmers*. Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
- Henley, D. (2007) 'Custom and koperasi: the co-operative ideal in Indonesia', In J. Davidson and D. Henley (eds.) *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Henley, D. and P. Boomgaard (2009) *Credit and Debt in Indonesia, 860-1930: From Peonage to Pawnshop from Kongsu to Cooperative*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Holloway, G., Nicholson, C., Delgado, C., Staal, S. and S. Ehui (2000) 'Agroindustrialization through institutional innovation – transaction costs, cooperatives and milk-market development in the east-African highlands', *Agricultural Economics* 23: 279–88.
- INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- International Labour Office. 2000. *ABC of Women Workers Rights and Gender Equality*. Geneva: ILO.
- International Finance Cooperation (2014) 'Integrating women into the coffee supply chains in Indonesia and Vietnam'.
- Kansrini, Y., Zuliyanti, A., Mulyani, P.W. and D. Pirmansyah (2020) 'The role of cooperation in empowerment of coffee farmers in Mandailing Natal District', *Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA)* 2 (2).
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, UNFPA dan BKKBN. 2001. *Bungarampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan*. Buku 02.
- Khalisuddin dkk., 2012. *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*. Banda Aceh: BPNB Banda Aceh.
- Lecoutere, E. (2017) 'The impact of agricultural co-operatives on women's empowerment: evidence from Uganda', *Journal of Co-operative Organization and Management* 5 (1): 14–27.
- Majurin, E. (2012) *How women fare in east African cooperatives: The case of Kenya, Tanzania and Uganda*. Dar es Salaam: International Labour Organization.
- Marasabessy, S., Abdulmudy, R. and M.C.B. Umanailo (2020) 'Factors that influence the success of rural women empowerment in Salahutu District'. Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Dubai, UAE. 10–12 March.
- Mayoux, L. and S. Mosedale (2005) 'Impact assessment for pro-poor accountability: innovations and challenges', *Journal of International Development* 17 (2): 187–93.
- Megawangi, Ratna. *Kesetaraan Harus Sesuai Kodrat*. www.republika.co.id. Tanggal 29 Mei 2004.

- Merdeka.com. “Menko PUKM: Aceh Punya Koperasi Wani Gayo yang Mendunia”. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkopukm-aceh-punya-koperasi-wanita-gayo-yang-mendunia.html> diakses pada 21 November 2021, pukul 09.45 WIB).
- Molk, P. (2014) ‘The puzzling lack of cooperatives’, *Tulane Law Review* 99: 899–958.
- Mugniensyah, Siti Sugiah M.. 2004. *Pendekatan Kebijakan Pembangunan untuk Perempuan: Women In Development (WID) dan Gender And Development (GAD)*. Makalah Workshop Pengarusutamaan Gender, Dikdasmen, Depdiknas RI.
- Narayan, Deepa (ed.) (2002) *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington D.C.: The World Bank.
- Oberhauser, A.M. and A. Pratt (2004) ‘Women’s collective economic strategies and political transformation in rural South Africa’, *Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography* 11 (2): 209–28.
- Piesse, J., Doyer, T., Thirtle, C. and N. Vink (2005) ‘The changing role of grain cooperatives in the transition to competitive markets in South Africa’, *Journal of Comparative Economics* 33: 197–218.
- Pineda, J.A., Piniero M. and A. Ramirez (2019) ‘Coffee production and women’s empowerment in Colombia’, *Human Organization* 78 (1): 64–74.
- Putri, M.A., Fariyanti, A. and N. Kusnadi (2013) “Market structure and integration of Arabica Gayo Coffee in Aceh Tengah and Bener Meriah Districts.” *Buletin RISTR* 4 (1): 47–54.
- Rahman, D.F. (2020) ‘Agriculture exports grow as coffee, vegetables, fruits in demand’, *The Jakarta Post* 20 October.
- Rostiawati, Yustina. 2004. *Memutus Rantai, Meretas Jalan, Menuju Sikap Mengajar yang Sensitif Gender*. Makalah Workshop Pengarusutamaan Gender, Dikdasmen, Depdiknas RI.
- Sudaryanto, R., and R.R. Wijayanti (2013) *The strategy for empowering MSMEs faces the Asean free market*. Center for Macroeconomic Policy. Jakarta: Fiscal policy Agency, Ministry of Finance.
- Syden, R. and M. Lee (2016) ‘Development of agricultural cooperative in Cambodia - lessons from South Korea’, *Journal of Agricultural Extension & Community Development* 23 (2): 195–210.
- Syuaib, M.F. (2016) ‘Sustainable agriculture in Indonesia: facts and challenges to keep growing in harmony with environment’, *CIGR Journal* 18 (2): 170–84.
- Tap MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*
- Tesfay, A. and H. Tadele (2013) ‘The role of cooperatives in promoting socio-economic empowerment of women: evidence from multipurpose cooperative societies in South-Eastern Zone of Tigray, Ethiopia’, *International Journal of Community Development* 1 (1): 1–11.
- The Canada–Indonesia Trade and Private-Sector Assistance (TPSA) (2018) ‘Pembelajaran dari Lapangan: Capaian TPSA di Bidang Lingkungan Hidup di Sektor Kopi’, *A Report*.

In collaboration with Fairtrade Network of Asia-Pacific Producers (NAPP). Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project Report: 1–43.

Tim Prima Pena. Tanpa Tahun. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Gitamedia Press.

Trivedi, J., Priyan, P.K. and V. Bhide (2011) ‘The role of dairy cooperatives in women empowerment’, *The IUP Journal of Agricultural Economics* 13 (1): 41–51.

Tortia, E.C., Valentinov, V. and C. Iliopoulos (2013) ‘Agricultural cooperatives’, *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 2 (1): 23–26.

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Depdiknas RI.

USAID Green Invest Asia (2019) *Women in Coffee: The Role of Women-led Businesses in Southeast Asia’s Coffee Value Chains Analysis of Women’s Participation and Opportunities for Growth in Coffee Value Chains in Cambodia, Indonesia, the Philippines and Vietnam.* Bangkok: USAID Green Invest Asia.

Wood J.T. 2001. *Gendered Lives, Communication, Gender, and Culture.* Wadsworth, UK.